



# LKJIP 2025 SEMESTER II

## LAPORAN KINERJA

### INSTANSI PEMERINTAH

#### LAPAS KELAS IIA WATAMPONE

#### TAHUN ANGGARAN 2025



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas curahan rahmat dan hikmah-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone dapat terselesaikan. Laporan Kinerja ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini berisi pertanggungjawaban kinerja Lapas Kelas IIA Watampone kepada publik atas pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone pada Tahun Anggaran 2025. Laporan Kinerja ini juga akan menjadi bahan evaluasi yang digunakan dalam proses perencanaan program dan kegiatan di tahun berikutnya .

Laporan Kinerja ini menggambarkan sejumlah capaian kinerja beserta analisisnya atas target kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun 2025. Dalam pelaksanaannya, upaya pencapaian target kinerja ini memiliki banyak permasalahan dan hambatan baik dari aspek organisasi, tata kelola, sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana, yang memberi dampak pada optimalisasi kinerja. Namun segala keterbatasan dan permasalahan ini tidak menjadi penghalang bagi kami untuk terus berkarya mewujudkan visi dan misi organisasi, baik dari sisi penegakan hukum maupun dari sisi pelayanan publik. Kami berharap dengan telah disusunnya LKjIP Lapas Kelas IIA Watampone Tahun 2025, diperoleh manfaat umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja lembaga ini dalam upayanya membangun kultur organisasi yang lebih profesional dan akuntabel, agar kepercayaan publik terhadap institusi pemasyarakatan semakin meningkat.

Ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga upaya pencapaian target kinerja ini dapat terlaksana dengan baik.

Watampone, 10 Desember 2025

Plt. Kepala



**ASHARI, A.Md. IP., S.H., M.Si.**

NIP. 19780529 200012 1 001

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan mengacu pada Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor MIP-OT.02.02-49 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Semester II ini berisi pelaksanaan program Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Watampone sebagai upaya untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, serta beberapa pokok permasalahan yang merupakan kendala dalam pencapaian sasaran dan penghambat pelaksanaan program.

Akuntabilitas kinerja yang memuat pengukuran kinerja yaitu menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Pemasarakatan.

Sepanjang Tahun 2025 Semester II, pelaksanaan 4 (Empat) Sasaran Strategis Lembaga pemasarakatan Kelas IIA Watampone yang diemban ke dalam 11 Indikator Kinerja yang telah dilaksanakan dengan capaian sebagai berikut :

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan	Persentase Keberhasilan Pembinaan Kemandirian Warga Binaan yang Mendapatkan Predikat Sangat Baik	40%	93%	235.5%
		Persentase Keberhasilan Pembinaan Kepribadian Narapidana dan Anak Binaan yang Mendapatkan Predikat Sangat Baik	80%	99.06%	165.1%
2.	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasarakatan	Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen	75%	100%	133.3%
		Indeks Pencegahan	2,6	3.0	115%
		Indeks Penindakan	2,8	4.0	142%
3.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Anak, Anak Binaan, Tahanan, dan Narapidana	Persentase UPT Pemasarakatan dengan Indeks Kesehatan Lingkungan Kategori Baik	10%	76.68%	766.8%
		Persentase Satker dengan Indeks Kesehatan Fisik Kategori Baik	15%	83.84%	558.9%
		Persentase Penanganan Kasus Kesehatan Mental	8%	Nihil	Nihil
		Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasarakatan	80%	87.97%	109.96%
4.	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan	Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan	100%	100%	100%
		Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasarakatan terhadap layanan kesekretariatandi UPT masing-masing	3,51	3.73	106%

Adapun rincian realisasi anggaran Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Watampone berdasarkan jenis belanja pada <http://spanint.kemenkeu.go.id/> tanggal 10 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Jenis Belanja	Pagu	Realisasi
Belanja Pegawai	Rp. 7.845.422.000	Rp. 7.708.764.143
Belanja Barang	Rp. 8.689.955.000	Rp. 7.602.003.041
Belanja Modal	0	0

Adapun pagu Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Watampone sebesar Rp 16.535.377.000,- (Enam Belas Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dengan perincian bahwa untuk belanja pegawai memiliki pagu sebesar Rp 7.845.422.000,- (Tujuh Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp 7.708.764.143,- (Tujuh Milyar Tujuh Ratus Delapan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Seratus Empat Puluh Tiga Rupiah) atau sebesar 98,26%.

Adapun pagu untuk belanja barang sebesar Rp 8.689.955.000,- (Delapan Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp 7.602.003.041,- (Tujuh Milyar Enam Ratus Dua Juta Tiga Ribu Empat Puluh Satu Rupiah) atau sebesar 87,48%.

Adapun pagu untuk belanja modal sebesar Rp 0,- (Nol Rupiah), terealisasi sebesar Rp 0,- (Nol Rupiah) atau sebesar 0%.

#### Nilai IKPA dan Nilai SMART

Capaian	Nilai	Bobot%	Persentase	Nilai Capaian Kinerja Anggaran
SMART	95.66%	60%	57.3%	97.3%
IKPA	100%	40%	40%	

Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Watampone pada tahun 2025 adalah 100% dari target nilai IKPA adalah 100.

Nilai system monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu Kementerian Keuangan (SMART) pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Watampone pada tahun 2024 telah berjalan dengan sangat baik kareda adanya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
IKHTISAR KHUSUS.....	ii
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR TABEL .....	v
DAFTAR GAMBAR .....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	3
C. Maksud dan Tujuan .....	7
D. Aspek Strategis .....	7
E. Isu Strategis.....	8
F. Sistematika Laporan .....	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	10
A. Rencana Strategis .....	10
B. Perjanjian Kinerja .....	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	14
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	14
SK 14 Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan .....	16
SK 15 Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasarakatan .....	25
SK 16 Meningkatnya Kualitas Kesehatan Anak, Anak Binaan, Tahanan, dan Napi.....	39
SK 19 Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan.....	69
B. Realisasi Anggaran.....	77
C. Capaian Kinerja Anggaran.....	78
D. Capaian Kinerja Lainnya.....	79
BAB IV PENUTUP .....	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	83
DATA DUKUNG.....	85

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Pegawai.....	6
Tabel 2. Sistematika Laporan.....	8
Tabel 3. Perjanjian Kinerja.....	13
Tabel 4. Anggaran Program.....	13
Tabel 5. Capaian Kinerja Lapas Kelas IIA Watampone.....	15
Tabel 6. Keberhasilan Pembinaan Kemandirian.....	17
Tabel 7. Perbandingan Target dan Capaian IKK 14.1.....	17
Tabel 8. Perbandingan Capaian IKK 14.1 dengan Renstra.....	18
Tabel 9. Keberhasilan Pembinaan Kepribadian.....	21
Tabel 10. Perbandingan Target dan Capaian IKK 14.2.....	21
Tabel 11. Perbandingan Capaian IKK 14.2 dengan Tahun 2024.....	22
Tabel 12. Perbandingan Capaian IKK 14.2 dengan Renstra.....	22
Tabel 13. Laporan Analisa Intelegen.....	26
Tabel 14. Laporan Tindak Lanjut.....	26
Tabel 15. Perbandingan Target dan Capaian IKK 15.1.....	27
Tabel 16. Perbandingan Capaian IKK 15.1 dengan Renstra.....	28
Tabel 17. Jumlah Petugas yang tidak melakukan pelanggaran SOP.....	30
Tabel 18. Jumlah Petugas yang mendapatkan habituasi.....	30
Tabel 19. Jumlah Kegiatan yang terdapat temuan.....	31
Tabel 20. Jumlah warga binaan yang negative narkoba.....	31
Tabel 21. Perbandingan Target dan Capaian IKK 15.2.....	31
Tabel 22. Perbandingan Capaian IKK 15.2 dengan Renstra.....	33
Tabel 23. Jumlah WBP yang mendapatkan sanksi.....	35
Tabel 24. Kasus Pelarian.....	35
Tabel 25. Perbandingan Target dan Capaian IKK 15.3.....	36
Tabel 26. Perbandingan Capaian IKK 15.3 dengan Renstra.....	37
Tabel 27. Indikator Kesehatan Lingkungan dengan Kategori Baik.....	40
Tabel 28. Formulasi Perhitungan IKK 16.1.....	45
Tabel 29. Perbandingan Target dan Capaian IKK 16.1.....	45
Tabel 30. Perbandingan Capaian IKK 16.1 dengan Renstra.....	47
Tabel 31. Pemenuhan Kebutuhan Dasar.....	51

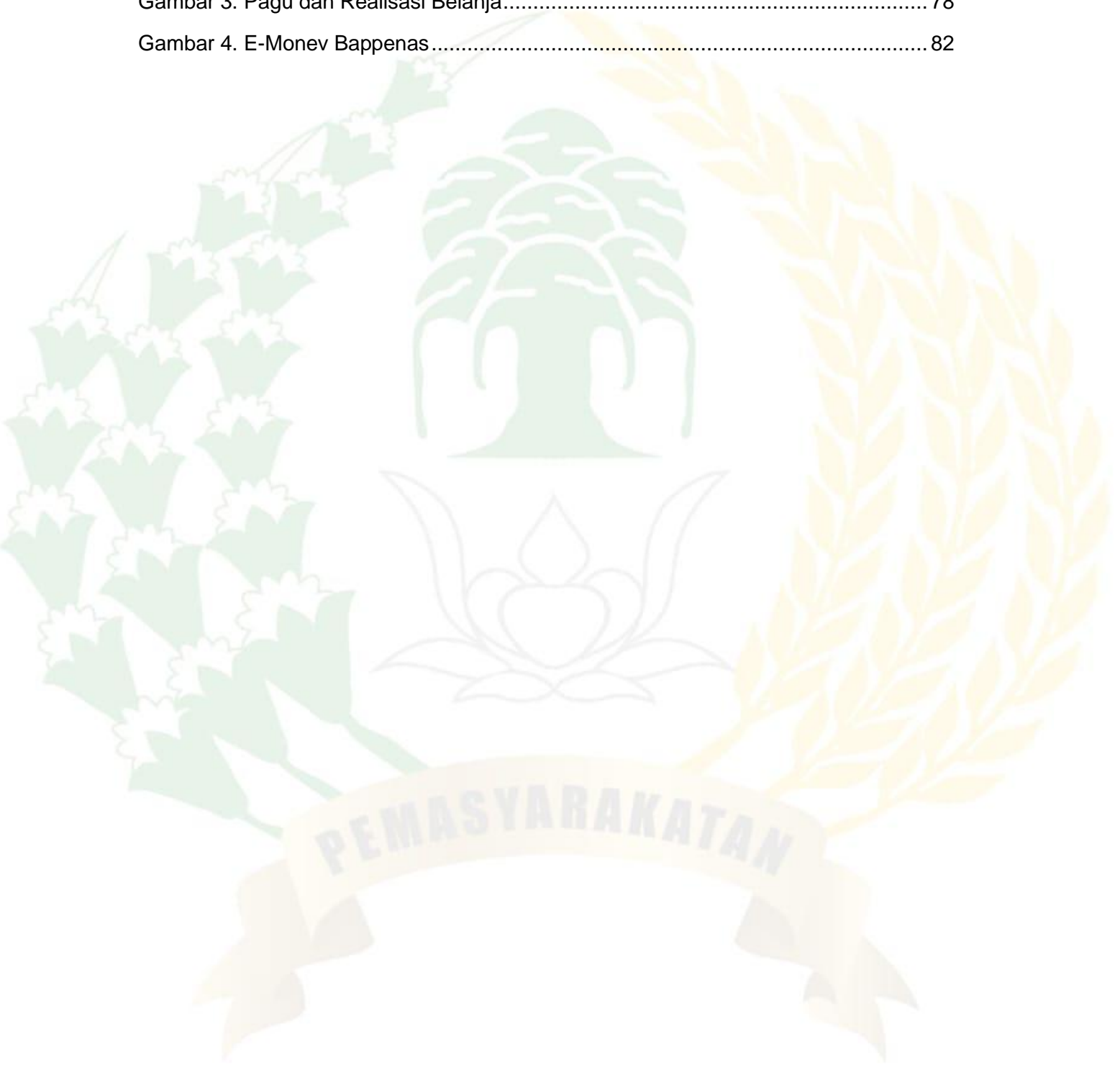
Tabel 32. Program Pencegahan dan Penanganan Stunting.....	51
Tabel 33. Penyelenggaraan Aktivitas Fisik.....	51
Tabel 34. Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehata Dasar .....	52
Tabel 35. Penyelenggaraan Layanan Bagi Kelompok Berkebutuhan Khusus .....	53
Tabel 36. Penyelenggaraan Pemenuhan Layanan Perawatan Kesehatan Lanjutan ...	53
Tabel 37. Jumlah WBP yang terdaftar PBI JK.....	54
Tabel 38. Penyelenggaraan esehatan Paliatif .....	54
Tabel 39. Penyelenggaraan Rehabilitasi .....	54
Tabel 40. Pengendalian Penyakit Menular .....	55
Tabel 41. Penanganan Penyakit Menular.....	55
Tabel 42. Skrining WBP baru .....	55
Tabel 43. Perbandingan Target dan Capaian IKK 16.2 .....	56
Tabel 44. Perbandingan Capaian IKK 16.2 dengan Renstra .....	57
Tabel 45. Penanganan Kasus Kesehatan Mental.....	61
Tabel 46. Perbandingan Target dan Capaian IKK 16.3 .....	61
Tabel 47. Perbandingan Capaian IKK 16.3 dengan Tahun 2024.....	62
Tabel 48. Perbandingan Capaian IKK 16.3 dengan Renstra .....	62
Tabel 49. Mutu Pelayanan Kesehatan .....	64
Tabel 50. Jumlah Pasien Keluar .....	64
Tabel 51. Jumlah Pasien Keluar dan Tempat Tidur.....	65
Tabel 52. Jumlah Observasi Kebersihan Tangan.....	65
Tabel 53. Jumlah Petugas Patuh .....	65
Tabel 54. Jumlah Pasien Survey.....	65
Tabel 55. Sarana dan Prasarana Klinik.....	66
Tabel 56. Ketersediaan SDM Kesehatan .....	66
Tabel 57. Kerjasama Fasilitas Pelayanan Kesehatan.....	66
Tabel 58. Perbandingan Target dan Capaian IKK 16.4 .....	67
Tabel 59. Perbandingan Capaian IKK 16.4 dengan Renstra .....	67
Tabel 60. Pelaksanaan RB.....	71
Tabel 61. Perbandingan Target dan Capaian IKK 19.1 .....	71
Tabel 62. Perbandingan Capaian IKK 19.1 dengan Tahun 2024.....	71
Tabel 63. Perbandingan Capaian IKK 19.1 dengan Renstra .....	72

Tabel 64. Survey Layanan Kesekretariatan.....	74
Tabel 65. Perbandingan Target dan Capaian IKK 19.2 .....	75
Tabel 66. Perbandingan Capaian IKK 19.2 dengan Tahun 2024.....	75
Tabel 67. Perbandingan Capaian IKK 19.2 dengan Renstra .....	75
Tabel 68. Realisasi Anggaran .....	77
Tabel 69. Nilai IKPA dan SMART.....	79



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Lapas Kelas IIA Watampone.....	4
Gambar 2. Kinerja Anggaran.....	78
Gambar 3. Pagu dan Realisasi Belanja.....	78
Gambar 4. E-Monev Bappenas.....	82



# BAB I

## PENDAHULUAN

Sistem kepenjaraan yang menekankan pada unsur penjaraan dan menggunakan titik tolak pandangannya terhadap narapidananya sebagai individu semata-mata dipandang sudah tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Bagi bangsa Indonesia pemikiran-pemikiran mengenai fungsi pemidanaan tidak sekedar pada aspek penjaraan belaka, tetapi juga merupakan suatu rehabilitasi dan reintegrasi sosial telah melahirkan suatu sistem pembinaan terhadap pelanggar hukum yang dikenal sebagai sistem pemasyarakatan.

Gagasan pemasyarakatan dicetuskan pertama kali oleh Dr. Saharjo, SH pada tanggal 5 Juli 1963 dalam pidato penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa di bidang hukum oleh Universitas Indonesia antara lain dikemukakan bahwa: “di bawah pohon beringin pengayoman telah kami tetapkan untuk menjadi penyuluh bagi petugas dalam membina Narapidana agar bertobat. Mendidik supaya ia menjadi anggota masyarakat yang berguna. Dengan singkat tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan”

Koreksional merupakan salah satu setting yang perlu mendapatkan perhatian serius dari profesi pekerjaan sosial karena di dalamnya begitu banyak permasalahan yang perlu ditangani, baik secara individu, kelompok maupun masyarakat. Adanya perubahan paradigma dalam pelayanan koreksional dari pendekatan hukuman menjadi pendekatan penyembuhan pun merupakan salah satu hal yang menjadi perhatian dari profesi pekerjaan sosial. Dengan demikian, para petugas koreksional perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan profesi pekerjaan sosial yang mendukung dalam pelaksanaan tugas-tugas pembinaan dan pembimbingan pada setting koreksional.

### **A. Latar Belakang**

Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone berdiri pada tahun 1960 yang terletak di Jalan Merdeka, Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone di atas tanah seluas 6.413 m<sup>2</sup>. Pada tahun 1985, Lapas Kelas IIA Watampone dipindahkan dari lokasi lama di Jalan Merdeka ke lokasi baru yang terletak di Jl. Laks. Yos Sudarso Km. 4, Kelurahan Cellu, Kec. Tanete Riattang Timur, Kab. Bone.

#### **1. Periode Kepemimpinan**

Berdasarkan sejarah berdirinya, urutan periode kepemimpinan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone adalah sebagai berikut :

1960 – 1980	: -
19-01-1980 s/d 04-10-1986	: S. Duma, BA.
17-11-1086 s/d 25-11-1991	: Utomo Ismail, Bc.IP.
25-11-1991 s/d 31-07-1998	: Drs. Bambang Margono
19-10-1998 s/d 09-06-2000	: Drs. Subagyo, Bc.IP.
21-02-2003 s-d 17-01-2006	: Drs. I. W. K. Dusak, Bc.IP.,SH.
18-01-2006 s-d 15-01-2009	: I. Nyoman Putra Surya A., Bc.IP.,SH.,MH.
16-01-2009 s-d 31-05-2009	: Fatkhuluddin Alie, Bc.IP.,SH.
05-06-2009 s-d 29-01-2013	: Suprpto, Bc.IP.,SH.,MH.
29-01-2013 s-d 04-03-2014	: Supeno Djoko Bintoro, Bc.IP.,SH.,MH.
04-03-2014 s-d 29-11-2014	: Iwan Amir, Bc.IP.,SH.,M.Si.
29-11-2014 s-d 20-01-2017	: R. Sunarhadihartadi, Bc.IP.,SH.,MH.
20-01-2017 s-d 14-01-2021	: Lukman Amin, SH.,MH
14-01-2021 s-d 31-12-2021	: Drs. Sudirman Zainuddin, M.Si.
31-12-2021 s-d 01-12-2025	: Saripuddin Nakku, S.Sos., SH.

## 2. Luas Lahan Dan Lokasi

Berdasarkan Laporan Barang Milik Negara Periode Desember 2021, Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Watampone memiliki 3 lokasi tanah sebagai berikut :

### a. Tanah dengan luas 6.413 m<sup>2</sup>

Bersertifikat Hak Penguasaan (Hak Pakai Instansi) No. 7 an. Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Tanah ini merupakan lokasi berdirinya Lapas Watampone lama sebelum pindah ke lokasi baru. Pada tanah ini berdiri gedung lapas watampone lama dengan kondisi rusak berat dan 2 unit rumah negara golongan I type C permanen.

### b. Tanah dengan luas 25.000 m<sup>2</sup>

Bersertifikat Hak Pakai No. 12 an. Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pada tanah ini berdiri gedung kantor Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Watampone. Selain itu juga terdapat :

- 1 unit rumah negara golongan I type C permanen
- 6 unit rumah negara golongan I type E permanen

c. Tanah dengan luas 360 m<sup>2</sup>

Bersertifikat Hak Pakai No. 9 an. Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pada tanah ini berdiri 3 unit rumah negara golongan I type D permanen

Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Watampone berlokasi di Jl. Laks. Yos Sudarso Km. 4, Kelurahan Cellu, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan. Memiliki jalur akses yang sangat baik sehingga memudahkan setiap orang khususnya warga masyarakat yang keluarga maupun kerabatnya berada dalam lapas. Batas-batas Lapas Kelas IIA Watampone adalah sebagai berikut :

Sebelah utara : jalan raya  
Sebelah selatan : persawahan  
Sebelah barat : perumahan warga  
Sebelah timur : perumahan warga

## **B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi**

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.01.PR.07.03 tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasarakatan, tugas pokok dan fungsi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Watampone adalah sebagai berikut :

### **1. Tugas**

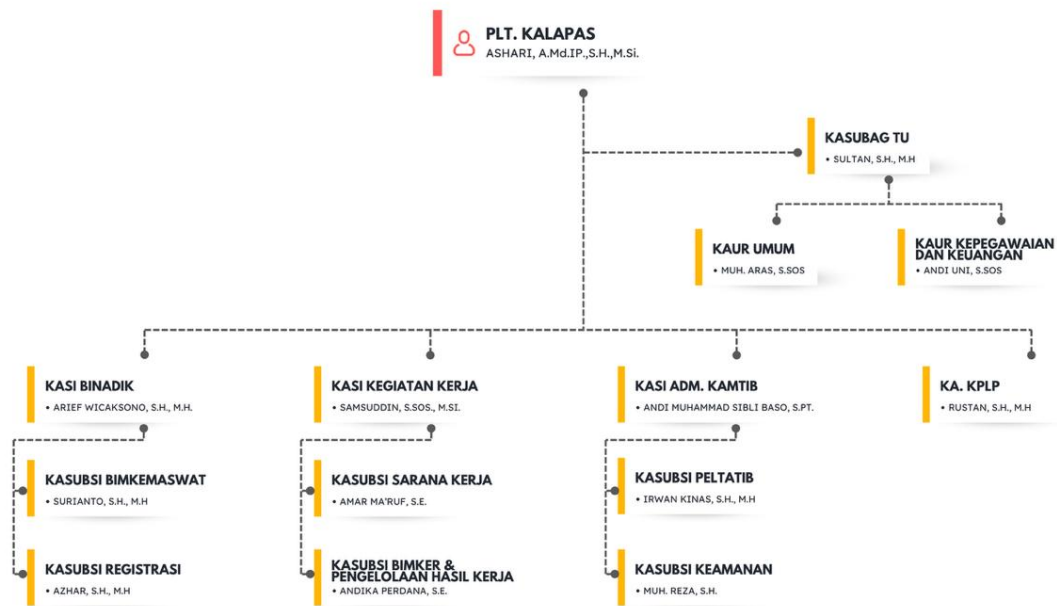
Melaksanakan pemsarakatan narapidana dan anak didik

### **2. Fungsi**

- a. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja
- b. Melakukan bimbingan sosial/kerohanian narapidana dan anak didik
- c. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib LAPAS
- d. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga

Sedangkan wewenang Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Watampone adalah memberikan pelayanan terkait hak tahanan dan warga binaan pemsarakatan dan juga pembinaan baik kepribadian maupun keterampilan.

Struktur Organisasi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Watampone dapat dilihat pada bagan organisasi berikut :



Gambar 1. Struktur Lapas Kelas IIA Watampone  
Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Watampone terdiri dari :

### 1. Sub Bagian Tata Usaha

Tugas

Memiliki tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga LAPAS

Fungsi

- a. Melakukan urusan kepegawaian dan keuangan;
- b. Melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Kepegawaian

Mempunya tugas urusan kepegawaian dan keuangan

- b. Urusan Umum

Mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

### 2. Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik

Tugas

Mempunyai tugas memberikan bimbingan pemsarakatan narapidana/anak didik

Fungsi

- a. Melakukan registrasi dan membuat statistic serta serta dokumentasi sidik jari narapidana / anak didik.
- b. Memberikan bimbingan pemasyarakatan, mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana dan anak didik.

Seksi Bimbingan Narapidana / Anak Didik terdiri dari :

- a. Sub Seksi Registrasi  
Mempunya tugas Melakukan registrasi dan membuat statistic serta serta dokumentasi sidik jari narapidana / anak didik
- b. Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan  
Mempunyai tugas Memberikan bimbingan pemasyarakatan, mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana dan anak didik.

### 3. **Seksi Kegiatan Kerja**

Tugas

Mempunyai tugas memeberikan bimbingan kerja mempersiapkan sarana kerja dan dan mengelolah hasil kerja.

Fungsi

- a. Memberikan bimbingan latihan kerja bagi narapidana / anak didik dan mengelola hasil kerja.
- b. Mempersiapkan fasilitas hasil kerja

Seksi Kegiatan Kerja terdiri dari :

- a. Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja  
Mempunya tugas Memberikan bimbingan dan pengelolaan hasil kerja bagi narapidana / anak didik serta mengelola hasil kerja.
- b. Sub Seksi Sarana Kerja  
Mempunyai tugas Mempersiapkan fasilitas hasil kerja

### 4. **Seksi Administarsi Keamanan dan Tata Tertib**

Tugas

Mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang betugas serta menyusun laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

Fungsi

- a. Mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan

- b. Menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib terdiri dari :

- a. Sub Seksi Keamanan

Mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan

- b. Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib

Mempunyai tugas Menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib

## 5. Kesatuan Pengamanan LAPAS

Tugas

Mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban LAPAS

Fungsi

- a. Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidanan / anak didik
- b. Melakukan pemeliharaan dan tata tertib
- c. Melakukan pengawalan penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana / anak didik
- d. Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan
- e. Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan

Dalam menjalankan tugas fungsi tersebut Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Watampone didukung Sumber Daya Manusia sebanyak 115 Pegawai dengan komposisi sebagai berikut :

Tabel 1. Jumlah Pegawai

No	Unit Pelaksan Teknis	Pria	Wanita	Jumlah
1.	Lapas Kelas IIA Watampone	94	21	115

Dari table diatas menunjukkan Pegawai Pria sebanyak 94 orang dan Pegawai Wanita sebanyak 21 orang.

### **C. Maksud dan Tujuan**

Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang pencapaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD). Adapun maksud penyusunan laporan kinerja adalah sebagai dokumen pertanggungjawaban kinerja yang berisi gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah dari pelaksanaan tugas dan fungsi atas penggunaan sumber daya (anggaran, SDM, sarpras, dll) yang disusun secara sistematis dan disampaikan secara periodik (bulanan, triwulan, semester, tahunan).

Sedangkan tujuan penyusunan laporan kinerja adalah sebagai berikut.

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

### **D. Aspek Strategis**

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan juga memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa sistem pemsarakatan menerapkan pendekatan yang humanis, berkeadilan, dan menghormati harkat serta martabat warga binaan pemsarakatan. Undang-Undang Pemsarakatan menegaskan bahwa pemenuhan hak-hak warga binaan meliputi hak atas pelayanan kesehatan, pendidikan, pembinaan, informasi, serta perlakuan yang tidak diskriminatif merupakan tanggung jawab negara yang harus dilaksanakan secara berkesinambungan dan profesional.

Lapas sebagai salah satu unit pelaksana teknis memiliki mandat untuk menyelenggarakan pembinaan, pembimbingan, perlindungan, pelayanan, serta perawatan bagi Warga Binaan Pemsarakatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Proses pembinaan dilakukan untuk membentuk Warga Binaan menjadi pribadi yang lebih mandiri, produktif, serta mampu kembali berintegrasi secara positif di tengah masyarakat. Seluruh layanan tersebut diberikan dengan mengedepankan asas non-diskriminatif, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta prinsip pemsarakatan yang berorientasi pada reintegrasi sosial.

Lapas juga terus berupaya meningkatkan kualitas layanan melalui pemenuhan standar penyelenggaraan pemsarakatan, peningkatan kapasitas SDM, penyediaan sarana prasarana yang layak, serta penguatan program-program pembinaan dan

kegiatan kemandirian. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen untuk menghadirkan pelayanan masyarakat yang lebih profesional, akuntabel, dan berdaya guna dalam mendukung tujuan besar pembinaan dan reintegrasi sosial.

### E. Isu Strategis

Pembinaan pada Lapas Kelas IIA Watampone belum berjalan secara optimal dikarenakan sarana dan prasarana tidak mendukung terutama gedung blok hunian dan gedung perkantoran perlu diadakan rehab demi meningkatkan pelayanan terkhusus WBP serta mendukung tugas-tugas pengolah (Pegawai) pada Lembaga Masyarakat Kelas IIA Watampone untuk dapat melaksanakan tugas dan pekerjaan pelayanan yang baik dan maksimal.

Bangunan digunakan juga untuk mendukung tercapainya tujuan serta terlaksananya fungsi pokok organisasi, oleh karena itu kegiatan renovasi bangunan sangat penting, mengingat gedung pada Lembaga Masyarakat Kelas IIA Watampone diresmikan sejak Tahun 1985 sampai sekarang belum pernah di rehab.

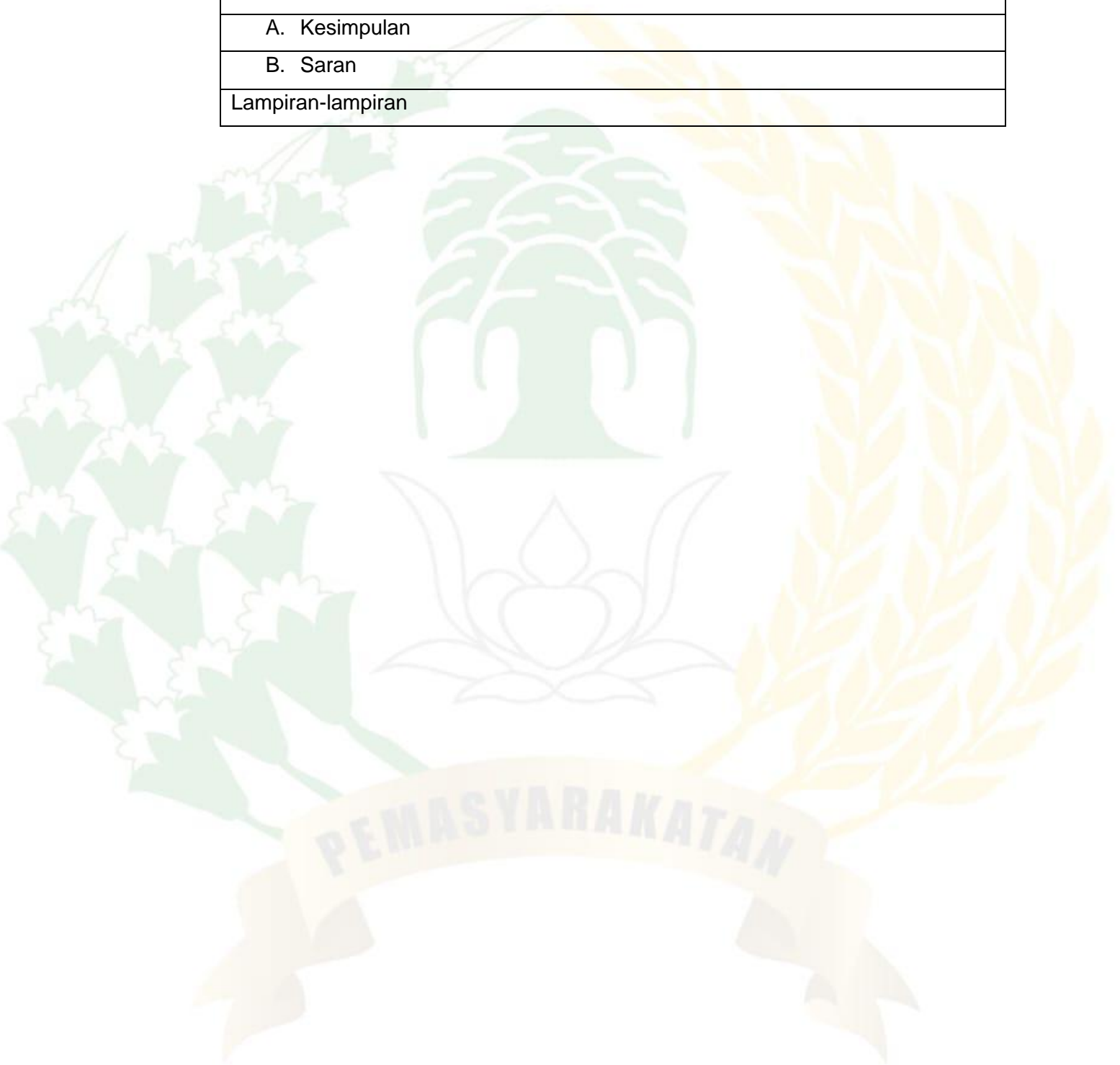
### F. Sistematika Laporan

Format penyajian atau sistematika penyusunan LKjIP Lapas Kelas IIA Watampone Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 2. Sistematika Laporan

<b>Sistematika Laporan</b>	
Kata Pengantar	
Daftar Isi	
Ikhtisar Eksekutif	
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang	
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	
C. Maksud dan Tujuan	
D. Aspek Strategis	
E. Isu Strategis	
F. Sistematika Laporan	
<b>BAB III PERENCANAAN KINERJA</b>	
A. Rencana Strategis	
B. Perjanjian Kinerja	
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
A. Capaian Kinerja Organisasi	

B. Realisasi Anggaran
C. Capaian Kinerja Anggaran
D. Capaian Kinerja Lainnya
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan
B. Saran
Lampiran-lampiran



## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. Rencana Strategis

Rencana strategis merupakan rencana jangka menengah organisasi mulai dari visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta kebijakan/strategi dalam upaya pencapaian kinerja.

##### 1. Visi, Misi, dan Tujuan

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi Presiden dan Wakil Presiden tersebut, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan periode 2025–2029 menetapkan visi **“Terwujudnya Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Berkeadilan, dan Mendukung Keamanan Nasional Tangguh Menuju Indonesia Emas 2045”**. Dalam mencapai visi tersebut, ditetapkan 8 (Misi) Adapun 8 misi Asta Cita presiden dan wakil presiden yang kemudian diterjemahkan menjadi 8 Prioritas Nasional (PN) mencakup: pembangunan yang disebut “Nawacita Kedua” yakni :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Berdasarkan visi dan misi tersebut, Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Watampone memiliki tujuan untuk menciptakan suasana aman dalam lingkungan

Lapas yaitu membimbing dan mendidik warga binaan pemasyarakatan untuk melakukan hal-hal positif agar kelak dapat menjadi orang yang berguna ketika kembali ke masyarakat.

## 2. Tata Nilai dan Sasaran Strategis

Di samping peran yang diemban oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tersebut, terdapat nilai-nilai utama yang juga menjadi landasan bersikap dan pondasi budaya kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Adapun nilai utama tersebut dirumuskan dalam singkatan "PRIMA".

### • **Profesional**

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjalankan tugas dan fungsi secara profesional, sesuai dengan keahlian dan kompetensi, berlandaskan dengan ilmu terkait bidangnya serta dilakukan dengan pendekatan yang humanis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

### • **Responsif**

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memberikan layanan secara cepat, tepat dan tanggap dalam melayani kebutuhan masyarakat baik kebutuhan yang terkait bidang imigrasi maupun pemasyarakatan. Sikap responsif dalam lingkup Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga dapat diwujudkan dalam bentuk kolaborasi atau kerja sama dengan stakeholders yang relevan dalam menyelesaikan permasalahan dan upaya peningkatan kualitas pelayanan.

### • **Integritas**

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjunjung tinggi nilai integritas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Integritas dicerminkan dalam bentuk perilaku jujur dalam bersikap dan bertindak dan berkeadilan dalam penegakan hukum. Nilai integritas yang menciptakan sumber daya manusia yang jujur, berani menolak segala bentuk intervensi dan mengedepankan keadilan dan kebenaran dalam penegakan hukum dan pelayanan.

### • **Modern**

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menggunakan sistem dan teknologi informasi yang modern dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta dilakukan secara transparan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penggunaan sistem dan teknologi informasi yang modern dalam konteks imigrasi dilakukan dalam penerapan teknologi yang mendukung pengawasan negara serta digitalisasi yang memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dalam konteks pemasyarakatan, penggunaan sistem dan teknologi informasi yang modern digunakan dalam upaya meningkatkan kualitas pembinaan warga binaan, peningkatan

pengawasan dan pemantauan secara lebih efektif dan 58 efisien yang dapat meminimalisir pelanggaran serta memperkuat proses reintegrasi sosial.

• **Akuntabel**

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan menjalankan tugas dan fungsi secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Upaya penegakan hukum yang akuntabel bermakna bahwa penegakan hukum dan pelayanan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, bangsa dan negara dan Menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.

Secara struktural, Lapas Kelas IIA Watampone merupakan unit pelaksana teknis pemsarakatan yang secara berjenjang bertanggung jawab kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemsarakatan Sulawesi Selatan, kemudian Direktorat Jenderal Pemsarakatan serta kepada Menteri Imigrasi dan Pemsarakatan Republik Indonesia. Sehingga sasaran strategis Lapas Kelas IIA Watampone mengikut pada sasaran strategis Kementerian Imigrasi dan Pemsarakatan Tahun 2025-2029, yaitu:

1. Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan perundang-undangan;
2. Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM;
3. Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan publik;
4. Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional;
5. Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI;
6. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat;
7. Meningkatkan kompetensi strategis sumber daya manusia di bidang Imigrasi dan Pemsarakatan; serta
8. Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien.

**B. Perjanjian Kinerja**

Perjanjian Kinerja pada UPT Pemsarakatan merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan UPT Pemsarakatan yang menerima amanah/tanggungjawab/kinerja dengan Direktur Jenderal Pemsarakatan sebagai pihak yang memberikan amanah/tanggungjawab/kinerja. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Perjanjian Kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh UPT Pemasarakatan dalam kurun waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Berikut akan diuraikan target kinerja tahun 2025 Semester II sesuai dengan indikator setiap sasaran serta kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Tabel 3. Perjanjian Kinerja

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1.	Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan	Persentase Keberhasilan Pembinaan Kemandirian Warga Binaan yang Mendapatkan Predikat Sangat Baik	40%
		Persentase Keberhasilan Pembinaan Kepribadian Narapidana dan Anak Binaan yang Mendapatkan Predikat Sangat Baik	80%
2.	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasarakatan	Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen	75%
		Indeks Pencegahan	2,6
		Indeks Penindakan	2,8
3.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Anak, Anak Binaan, Tahanan, dan Narapidana	Persentase UPT Pemasarakatan dengan Indeks Kesehatan Lingkungan Kategori Baik	10%
		Persentase Satker dengan Indeks Kesehatan Fisik Kategori Baik	15%
		Persentase Penanganan Kasus Kesehatan Mental	8%
		Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasarakatan	80%
4.	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan	Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan	100%
		Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasarakatan terhadap layanan kesekretariatandi UPT masing-masing	3,51

Tabel 4. Anggaran Program

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 7.187.011.00
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp. 7.187.011.00
Program Dukungan Manajemen	Rp. 9.348.386.000
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Rp. 9.348.386.000

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Kinerja (performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja biasa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak memiliki tolak ukur.

Sedangkan pengukuran kinerja (performance measurement) adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Untuk itu diperlukan indikator kinerja yang jelas, dapat dihitung, diukur, dan dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja yang baik.

Pengukuran capaian kinerja Lapas Kelas IIA Watampone dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja pada masing-masing sasaran kegiatan. Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran UPT Pemasarakatan dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja serta berbagai capaian organisasi selama periode satu tahun beserta analisis dan realisasi anggaran dalam rangka pencapaian kinerja dan penggunaan sumber daya. Pengukuran capaian kinerja Lapas Kelas IIA Watampone tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja pada masing-masing sasaran kegiatan.

Pencatatan Dan pengukuran kinerja dilakukan pada aspek kinerja keuangan dan nonkeuangan sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan suatu organisasi yang terintegrasi dalam sistem manajemen organisasi. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tahun 2025 Semester II, maka diperoleh data capaian kinerja Lapas Kelas IIA Watampone dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 5. Capaian Kinerja Lapas Kelas IIA Watampone

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan	Persentase Keberhasilan Pembinaan Kemandirian Warga Binaan yang Mendapatkan Predikat Sangat Baik	40%	93%	235.5%
		Persentase Keberhasilan Pembinaan Kepribadian Narapidana dan Anak Binaan yang Mendapatkan Predikat Sangat Baik	80%	99.06%	165.1%
2.	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasarakatan	Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen	75%	100%	133.3%
		Indeks Pencegahan	2,6	3.0	115%
		Indeks Penindakan	2,8	4.0	142%
3.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Anak, Anak Binaan, Tahanan, dan Narapidana	Persentase UPT Pemasarakatan dengan Indeks Kesehatan Lingkungan Kategori Baik	10%	76.68%	766.8%
		Persentase Satker dengan Indeks Kesehatan Fisik Kategori Baik	15%	83.84%	558.9%
		Persentase Penanganan Kasus Kesehatan Mental	8%	Nihil	Nihil
		Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasarakatan	80%	87.97%	109.96%
4.	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan	Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan	100%	100%	100%
		Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasarakatan terhadap layanan kesekretariatandi UPT masing-masing	3,51	3.73	106%



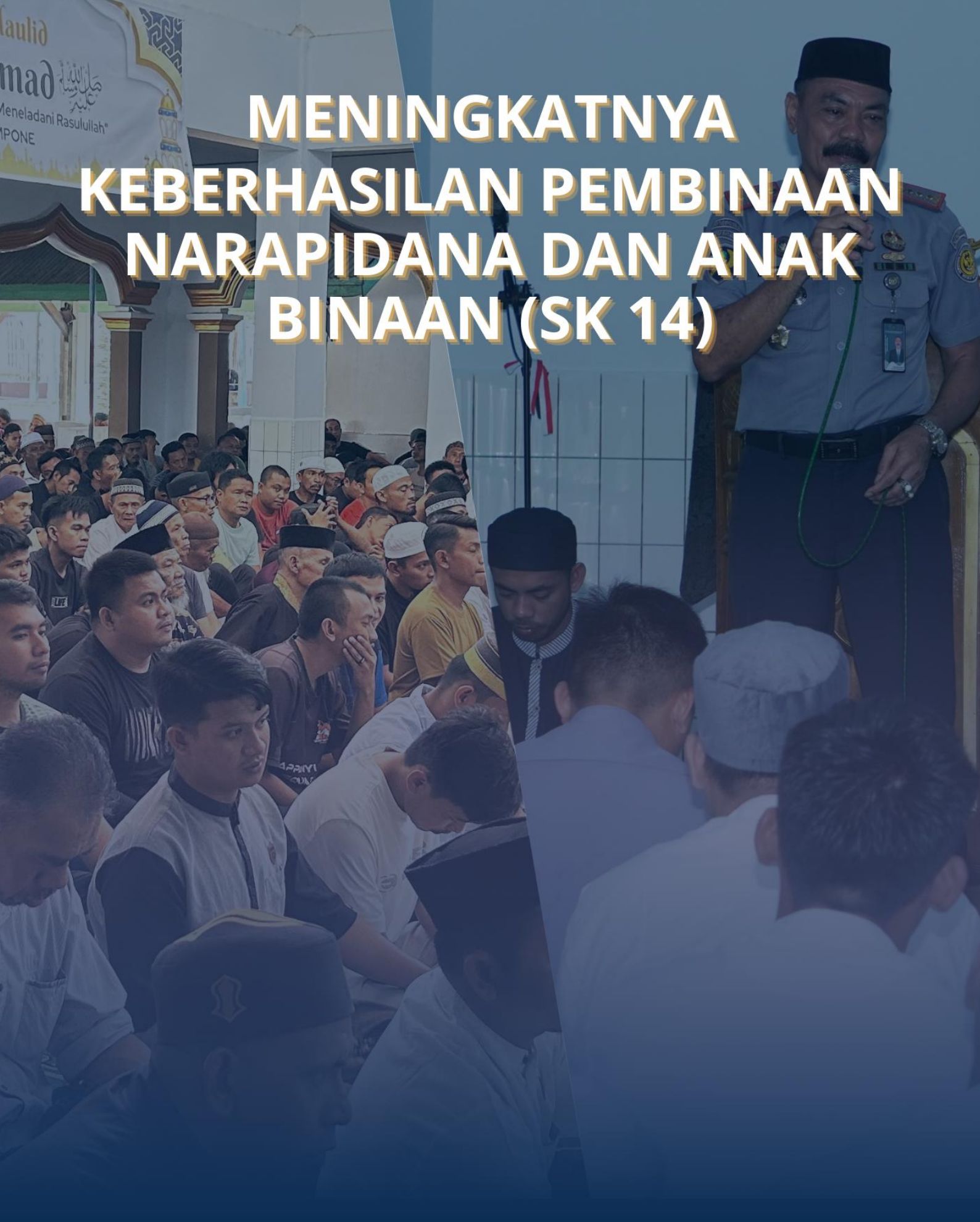
PEMASYARAKATAN



LAPAS KELAS IIA WATAMPONE



# MENINGKATNYA KEBERHASILAN PEMBINAAN NARAPIDANA DAN ANAK BINAAN (SK 14)



## A. SK 14. Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan

### 1. IKK 14.1 Persentase Keberhasilan Pembinaan Kemandirian Warga Binaan yang Mendapatkan Predikat Sangat Baik

Indikator Persentase Keberhasilan Pembinaan Kemandirian Narapidana yang Mendapatkan Predikat Sangat Baik secara spesifik mengukur kualitas dan efektivitas program pembinaan kemandirian dalam menghasilkan narapidana yang tidak hanya berpartisipasi, tetapi juga menunjukkan hasil yang luar biasa dalam pengembangan keterampilan dan potensi kemandirian mereka. Indikator ini dapat dihitung dengan cara narapidana yang mendapatkan nilai/predikat "sangat baik" pada pembinaan kemandirian dari total narapidana yang mengikuti program pembinaan kemandirian.

Tabel 6. Keberhasilan Pembinaan Kemandirian

No.	Bulan	Jumlah Narapidana yang mendapatkan nilai/predikat "sangat baik" pada pembinaan kemandirian	Narapidana yang mengikuti program kemandirian
1.	Juli	40	43
2.	Agustus	40	43
3.	September	40	43
4.	Oktober	40	43
5.	November	40	43
6.	Desember	40	43
	Total	240	258

#### FORMULASI PERHITUNGAN

$$\% = \frac{A}{B} \times 100\%$$

$$\% = \frac{240}{258} \times 100\%$$

$$\% = 93\%$$

#### a. Perbandingan target dan capaian

Tabel 7. Perbandingan Target dan Capaian IKK 14.1

No.	Indikator	Realisasi	Target	Capaian
1.	Persentase Keberhasilan Pembinaan Kemandirian Warga Binaan yang Mendapatkan Predikat Sangat Baik	93%	40%	232,5%

Persentase keberhasilan pembinaan kemandirian warga binaan yang memperoleh predikat **Sangat Baik** menunjukkan kinerja yang jauh melampaui target yang telah ditetapkan. Pada awal periode, indikator ini ditargetkan mencapai **40%**, namun realisasi yang diperoleh justru mencapai **93%**. Selisih yang besar antara target dan realisasi tersebut menghasilkan tingkat capaian sebesar **232,5%**.

Besarnya capaian ini menggambarkan bahwa proses pembinaan kemandirian tidak hanya berjalan efektif, tetapi juga mampu memberikan hasil yang lebih tinggi dari ekspektasi. Realisasi yang hampir mencapai seluruh populasi sasaran menunjukkan bahwa strategi pembinaan, pola pendampingan, serta pelaksanaan kegiatan keterampilan telah dijalankan secara konsisten dan mampu menjangkau lebih banyak warga binaan. Selain itu, tingginya persentase warga binaan yang meraih predikat **Sangat Baik** menandakan adanya peningkatan kualitas dalam aspek disiplin, pemahaman materi, serta kemampuan mengaplikasikan keterampilan yang diberikan.

Secara keseluruhan, capaian jauh di atas target ini menjadi indikator positif bahwa program pembinaan kemandirian berada pada jalur yang tepat dan memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan kompetensi warga binaan. Hasil ini juga dapat menjadi dasar untuk mempertahankan praktik pembinaan yang telah efektif serta mengidentifikasi aspek yang dapat diperluas untuk mencapai kualitas yang lebih baik pada periode selanjutnya.

b. Perbandingan Capaian dengan tahun 2024

Persentase Keberhasilan Pembinaan Kemandirian Warga Binaan yang Mendapatkan Predikat “Sangat Baik” tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2024, karena indikator ini belum tersedia dan belum digunakan sebagai ukuran kinerja pada tahun 2024. Indikator tersebut baru mulai diterapkan pada tahun 2025, sehingga tidak terdapat baseline atau data pembandingan dari tahun sebelumnya. Oleh karena itu, capaian 232.5% pada tahun 2025 menjadi nilai awal (baseline) untuk digunakan sebagai acuan evaluasi dan peningkatan pada tahun-tahun berikutnya.

c. Perbandingan capaian Tahun 2025 dengan Target jangka menengah dalam dokumen Resntra

Tabel 8. Perbandingan Capaian IKK 14.1 dengan Resntra

Indikator	Capaian (2025) & Target Jangka Menengah				
	2025	2026	2027	2028	2029
Persentase Keberhasilan Pembinaan Kemandirian Warga Binaan yang Mendapatkan Predikat “Sangat Baik”	232.5%	50%	60%	70%	80%

Berdasarkan dokumen **Rencana Strategis Lapas Kelas IIA Watampone Tahun 2025-2029**, target kinerja untuk indikator Persentase Keberhasilan Pembinaan Kemandirian Warga Binaan yang Mendapatkan Predikat Sangat Baik ditetapkan sebesar **40%**. Realisasi pada periode pelaksanaan menunjukkan angka **93%**, sehingga menghasilkan capaian sebesar **232,5%**. Deviasi positif yang sangat signifikan ini menggambarkan bahwa pelaksanaan pembinaan kemandirian berjalan jauh lebih efektif daripada proyeksi awal. Tingginya persentase warga binaan yang berhasil mencapai predikat *Sangat Baik* menunjukkan keberhasilan metode pelatihan, ketepatan pola pendampingan, serta kualitas penyelenggaraan program keterampilan yang diterapkan. Capaian yang jauh melampaui target ini sekaligus menjadi landasan (baseline) yang kuat dalam merumuskan arah peningkatan program pembinaan pada periode selanjutnya sebagaimana telah digariskan dalam Renstra Tahun 2025-2029

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator kinerja kegiatan ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase Keberhasilan Pembinaan Kemandirian Warga Binaan yang Mendapatkan Predikat “Sangat Baik” hanya dilakukan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

e. Analisis Faktor Keberhasilan

Keberhasilan Narapidana Pembinaan Kemandirian Warga Binaan yang Mendapatkan Predikat Sangat Baik, yakni adanya perjanjian kerjasama dengan dinas ketenagakerjaan Kabupaten Bone, sehingga pelaksanaan pemberian pelatihan dapat terlaksana bagi narapidana yang dianggap mampu mengikuti pelatihan yang dilaksanakan sehingga meningkatkan kemandirian. Selain itu, strategi pembinaan, pola pendampingan, serta pelaksanaan kegiatan keterampilan telah dijalankan secara konsisten dan mampu menjangkau lebih banyak warga binaan yang keberhasilan metode pelatihan, ketepatan pola pendampingan, serta kualitas penyelenggaraan program keterampilan yang diterapkan.

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Realisasi capaian pembinaan kemandirian yang mencapai 93% dari target 40% menunjukkan bahwa sumber daya pembinaan telah digunakan secara sangat efisien. Kinerja yang melampaui target hingga 232,5% menandakan bahwa tenaga pendamping, fasilitas, anggaran, dan waktu pelatihan menghasilkan output yang jauh lebih besar dibanding perencanaan awal.

Efisiensi ini juga diperkuat oleh kerja sama dengan BLK, yang menyediakan instruktur dan materi pelatihan tanpa menambah beban sumber daya internal. Dukungan tersebut membuat kualitas pembelajaran naik, namun tetap hemat dari sisi pemanfaatan sarana dan tenaga. Selain itu, pengawasan yang intensif terhadap warga binaan memastikan setiap sesi pelatihan berjalan sesuai tujuan tanpa pemborosan waktu dan fasilitas. Antusiasme warga binaan turut mempercepat proses pembelajaran sehingga penggunaan tenaga pendamping dan peralatan menjadi lebih efektif. Dukungan pemerintah daerah, khususnya melalui pembelian hasil karya kemandirian pada acara remisi 17 Agustus, menambah nilai ekonomi dari output pelatihan dan memperkuat keberlanjutan program tanpa membutuhkan sumber daya tambahan.

Secara keseluruhan, capaian jauh di atas target serta dukungan BLK, pengawasan yang baik, partisipasi aktif warga binaan, dan kontribusi pemerintah daerah menunjukkan bahwa pembinaan kemandirian telah dikelola dengan efisien dan menghasilkan dampak yang signifikan.

g. Analisa Program yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program-program kemandirian yang dilaksanakan di Lapas Kelas IIA Watampone seperti pembuatan tempe, peternakan ayam, berkebun, serta produksi furniture menjadi faktor penting yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja. Keragaman program ini memungkinkan warga binaan mengikuti kegiatan sesuai minat dan kemampuan mereka, sehingga meningkatkan partisipasi, motivasi, serta hasil akhir pembinaan. Setiap kegiatan juga memberikan pengalaman praktik langsung yang memperkuat keterampilan kerja mereka. Selain itu, adanya kerja sama eksternal seperti pelatihan dari BLK, pengawasan rutin dari petugas, serta tingginya antusiasme warga binaan memperkuat efektivitas pelaksanaan program sehingga capaian output dapat melampaui target.

Dukungan dari pemerintah daerah, khususnya melalui pembelian hasil karya warga binaan pada acara pemberian remisi 17 Agustus, turut memberikan dampak signifikan terhadap keberhasilan program. Dukungan ini tidak hanya meningkatkan nilai ekonomi dari produk pembinaan seperti tempe, ayam ternak, hasil kebun, dan furniture, tetapi juga memperluas ruang pemasaran karya mereka. Dengan kombinasi antara variasi program kemandirian, kolaborasi eksternal, pengawasan yang konsisten, dan respons positif pemerintah, keseluruhan kegiatan tersebut berkontribusi besar dalam memastikan pencapaian kinerja pembinaan tetap berada pada jalur yang baik dan menunjukkan hasil yang optimal.

## 2. IKK 14.2. Persentase Keberhasilan Pembinaan Kepribadian Narapidana dan Anak Binaan yang Mendapatkan Predikat Sangat Baik

Indikator Persentase keberhasilan pembinaan kepribadian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik merupakan persentase narapidana yang mendapatkan nilai/predikat Sangat Baik pada Variabel pembinaan kepribadian sesuai dengan SPPN.

Tabel 9. Keberhasilan Pembinaan Kepribadian

No.	Bulan	Jumlah Narapidana yang mendapatkan nilai/predikat “sangat baik” pada Variabel Pembinaan Kepribadian sesuai dengan SPPN	Narapidana yang mengikuti program kepribadian
1.	Juli	537	542
2.	Agustus	514	518
3.	September	498	502
4.	Oktober	483	491
5.	November	496	499
6.	Desember	0	0
Total		2.528	2.552

### FORMULASI PERHITUNGAN

$$\% = \frac{A}{B} \times 100\%$$

$$\% = \frac{2.528}{2.552} \times 100\%$$

$$\% = 99.06\%$$

#### a. Perbandingan target dan capaian

Tabel 10. Perbandingan Target dan Capaian IKK 14.2

No.	Indikator	Realisasi	Target	Capaian
1.	Persentase Keberhasilan Pembinaan Kepribadian Warga Binaan yang Mendapatkan Predikat Sangat Baik	99.06%	60%	165.1%

Persentase Keberhasilan Pembinaan Kemandirian Warga Binaan yang Mendapatkan Predikat **Sangat Baik** menunjukkan kinerja yang jauh melampaui target yang telah ditetapkan. Pada awal periode, indikator ini ditargetkan mencapai **60%**, namun realisasi yang diperoleh justru mencapai **99.06%**. Selisih yang besar antara target dan realisasi tersebut menghasilkan tingkat capaian sebesar **165.1%**.

Program Pembinaan Kepribadian menunjukkan capaian yang menggambarkan bahwa proses pembentukan sikap, perilaku, dan karakter warga binaan telah berjalan dengan sangat baik dan memberikan dampak positif yang luas. Pelaksanaan kegiatan yang terstruktur seperti pembinaan mental, bimbingan keagamaan, konseling, serta pembiasaan perilaku positif mampu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi warga binaan untuk mengembangkan kualitas diri. Konsistensi petugas dalam melakukan pendampingan serta kesesuaian metode pembinaan dengan kebutuhan warga binaan turut memperkuat efektivitas keseluruhan program, sehingga perubahan sikap dan peningkatan disiplin dapat terlihat secara nyata dalam keseharian mereka.

Secara umum, keberhasilan yang dicapai ini mencerminkan bahwa strategi pembinaan kepribadian berada pada arah yang tepat dan telah diimplementasikan dengan baik. Tingginya jumlah warga binaan yang menunjukkan perkembangan positif menjadi indikator bahwa materi, metode, serta pendekatan pembinaan telah mampu menumbuhkan kesadaran, tanggung jawab, dan kemampuan adaptasi yang lebih matang. Hasil ini dapat menjadi pijakan penting untuk mempertahankan praktik yang efektif sekaligus memperluas aspek pembinaan yang dirasa memberikan dampak paling besar, sehingga kualitas pembinaan kepribadian pada periode selanjutnya dapat terus meningkat dan semakin relevan dengan kebutuhan reintegrasi sosial warga binaan. Perbandingan Capaian dengan tahun 2024

b. Perbandingan Capaian dengan Tahun 2024

Tabel 11. Perbandingan Capaian IKK 14.2 dengan Tahun 2024

Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian 2024	Capaian 2025	Keterangan
Persentase Keberhasilan Pembinaan Kepribadian Warga Binaan yang Mendapatkan Predikat Sangat Baik	133,3%	165,1%	Realisasi pada Tahun 2024 adalah 100% dan 2025 adalah 99.06%, meskipun begitu Capaian di Tahun 2025 lebih besar dikarenakan targetnya 60%, sedangkan target Tahun 2024 adalah 75%.

c. Perbandingan capaian Tahun 2025 dengan Target jangka menengah dalam dokumen Resnra

Tabel 12. Perbandingan Capaian IKK 14.2 dengan Resnra

Indikator	Capaian (2025) & Target Jangka Menengah				
	2025	2026	2027	2028	2029
Persentase Keberhasilan Pembinaan Kemandirian Warga Binaan yang Mendapatkan Predikat "Sangat Baik"	165.1%	65%	70%	75%	80%

Berdasarkan dokumen **Rencana Strategis Lapas Kelas IIA Watampone Tahun 2025-2029**, target kinerja untuk indikator Persentase Keberhasilan Pembinaan Kepribadian Warga Binaan yang Mendapatkan Predikat Sangat Baik ditetapkan sebesar **60%**. Realisasi pada periode pelaksanaan menunjukkan angka **99.06%**, sehingga menghasilkan capaian sebesar **165.1%**. Deviasi positif yang sangat signifikan ini menggambarkan bahwa pelaksanaan pembinaan kepribadian berjalan jauh lebih efektif daripada proyeksi awal. Tingginya persentase warga binaan yang berhasil mencapai predikat *Sangat Baik* menunjukkan pembinaan mental, bimbingan keagamaan, konseling, serta pembiasaan perilaku positif mampu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi warga binaan untuk mengembangkan kualitas diri. Capaian yang jauh melampaui target ini sekaligus menjadi landasan (baseline) yang kuat dalam merumuskan arah peningkatan program pembinaan pada periode selanjutnya sebagaimana telah digariskan dalam Renstra Tahun 2025-2029

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator kinerja kegiatan ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase Keberhasilan Pembinaan Kepribadian Warga Binaan yang Mendapatkan Predikat “Sangat Baik” hanya dilakukan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

e. Analisis Faktor Keberhasilan

Faktor keberhasilan Pembinaan Kepribadian di Lapas turut dipengaruhi oleh kuatnya kolaborasi dan keberagaman program yang dijalankan secara konsisten serta menyentuh berbagai aspek kebutuhan warga binaan. Kerja sama dengan Kantor Urusan Agama memberikan dukungan pembinaan keagamaan yang lebih terarah, sementara kegiatan rutin seperti Program Yasinan setiap malam Jumat dan Program Melek Huruf Hijaiyah memperkuat pembinaan spiritual sekaligus meningkatkan literasi keagamaan. Di sisi lain, pelayanan bagi warga binaan beragama Kristen memastikan bahwa pembinaan kepribadian berjalan inklusif dan tidak meninggalkan kelompok mana pun. Pendampingan konseling oleh petugas menjadi faktor penting dalam membantu warga binaan mengelola stres, memperbaiki pola pikir, serta menumbuhkan kesiapan mental untuk berubah menjadi lebih baik. Selain itu, pembiasaan perilaku bersih lingkungan tidak hanya membentuk kedisiplinan dan kepedulian terhadap lingkungan, tetapi juga memperkuat internalisasi nilai-nilai tanggung jawab dan keteraturan. Seluruh elemen ini saling melengkapi sehingga menciptakan ekosistem pembinaan yang komprehensif dan efektif.

#### f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pemanfaatan sumber daya dalam pelaksanaan pembinaan kepribadian di Lapas menunjukkan tingkat efisiensi yang baik melalui berbagai strategi pemberdayaan internal. Pembentukan tim pengajar dari kalangan warga binaan yang saling mengajar membaca Al-Qur'an menjadi salah satu langkah strategis dalam mengoptimalkan SDM yang tersedia tanpa menambah beban anggaran. Selain itu, pemberdayaan warga binaan untuk membawa kuldum setiap selesai salat Zuhur dan Asar, pembentukan kelompok kebersihan untuk menjaga kerapian dan sanitasi area lapas, serta pelaksanaan dzikir bersama di blok wanita setiap selesai salat Magrib menunjukkan bahwa kegiatan pembinaan dapat berjalan secara rutin dengan memanfaatkan peran aktif warga binaan. Sinergi ini tidak hanya menekan kebutuhan penggunaan tenaga petugas, tetapi juga membangun rasa tanggung jawab, kemandirian, dan suasana lingkungan yang lebih tertib serta religius.

#### g. Analisa Program yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Berbagai program pembinaan kepribadian yang dilaksanakan di Lapas memberikan kontribusi besar terhadap keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja, terutama karena kegiatan-kegiatan tersebut dirancang untuk meningkatkan keterlibatan, motivasi, dan penguatan nilai spiritual warga binaan. Pelaksanaan lomba bacaan Al-Qur'an, lomba azan, serta lomba surah-surah pendek berperan dalam mengasah kemampuan religius sekaligus menumbuhkan rasa percaya diri dan suasana kompetisi yang sehat. Penyelenggaraan Maulid Nabi di dalam lapas turut memperkuat nilai kebersamaan dan membangun atmosfer keagamaan yang positif. Selain itu, kerja sama dengan Kantor Urusan Agama (KUA) dan Badan Musyawarah Antar Gereja (BAMAG) Lembaga Kristen Indonesia menjadi elemen penting yang memperkaya kualitas pembinaan, karena memberikan dukungan pembinaan keagamaan yang lebih terarah, inklusif, serta mampu menjangkau seluruh pemeluk agama di lapas. Kolaborasi eksternal ini tidak hanya membantu menghadirkan pembimbing yang kompeten, tetapi juga mendorong konsistensi pelaksanaan kegiatan pembinaan. Jika seluruh program tersebut dilaksanakan secara berkesinambungan dan didukung dengan pendampingan yang memadai, maka dampaknya akan terus memperkuat capaian kinerja; sebaliknya, jika pelaksanaannya tidak konsisten atau kurang dukungan sumber daya, potensi penurunan partisipasi dan efektivitas pembinaan dapat menjadi faktor penghambat dalam pencapaian target kinerja.



LAPAS KELAS IIA WATAMPONE

# Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan (SK15)



## B. SK 15. Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasarakatan

### 1. IKK 15.1 Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen

Indikator Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen merupakan ukuran penilaian maturitas penyelenggaraan pemsarakatan, melalui:

1. Penyelidikan dan Penggalangan Intelijen Pemsarakatan Jumlah laporan analisa intelijen dibagi jumlah satker x 4 laporan (bobot nilai 50%)
2. Pengamanan Intelijen Pemsarakatan Jumlah tindak lanjut rekomendasi dibagi total rekomendasi intelijen (bobot nilai 50%)

#### a). Jumlah Laporan Analisa Intelijen

Tabel 13. Laporan Analisa Intelijen

No.	Bulan	Jumlah Laporan Analisa Intelijen	Jumlah Pelaksanaan Intelijen
1.	Juli	1	1
2.	Agustus	3	3
3.	September	2	2
4.	Oktober	1	1
5.	November	1	1
6.	Desember	1	1
Total		9	9

#### b). Jumlah Tindak Lanjut

Tabel 14. Laporan Tindak Lanjut

No.	Bulan	Jumlah Tindak Lanjut	Jumlah Rekomendasi
1.	Juli	1	1
2.	Agustus	3	3
3.	September	2	2
4.	Oktober	1	1
5.	November	1	1
6.	Desember	1	1
Total		9	9

#### FORMULASI PERHITUNGAN

$$\% = A + B \times 100\%$$

$$\% = \left( \left( \frac{JA}{JP} \right) + \left( \frac{JT}{TR} \right) \right) \times 100\%$$

$$\% = \left( \left( \frac{9}{9} \right) + \left( \frac{9}{9} \right) \right) \times 100\%$$

$$\% = 100\%$$

a. Perbandingan target dan capaian

Tabel 15. Perbandingan Target dan Capaian IKK 15.1

No.	Indikator	Realisasi	Target	Capaian
1.	Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen	100%	75%	133,33%

Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen menunjukkan kinerja yang jauh melampaui target yang telah ditetapkan. Pada awal periode, indikator ini ditargetkan mencapai **75%**, namun realisasi yang diperoleh justru mencapai **100%**. Selisih yang besar antara target dan realisasi tersebut menghasilkan tingkat capaian sebesar **133,33%**.

Besarnya capaian pada indikator Pelaksanaan Operasi Intelijen mencerminkan bahwa seluruh rangkaian kegiatan deteksi dini, pengumpulan informasi, dan analisis situasi telah berjalan secara terarah dan memberikan hasil yang lebih optimal dari perkiraan awal. Realisasi yang mendekati cakupan penuh terhadap sasaran menunjukkan bahwa mekanisme pemantauan, pola koordinasi antarpetugas, serta sistem pelaporan intelijen telah diterapkan dengan konsisten sehingga informasi strategis dapat dihimpun secara cepat, tepat, dan berkelanjutan. Selain itu, tingginya kualitas produk intelijen yang dihasilkan menandakan adanya peningkatan kemampuan petugas dalam membaca potensi kerawanan, mengolah data menjadi temuan yang akurat, serta memberikan rekomendasi yang relevan bagi pengambilan keputusan pimpinan.

Secara keseluruhan, capaian yang melampaui target ini menjadi bukti bahwa Pelaksanaan Operasi Intelijen berada pada arah yang benar dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap stabilitas serta keamanan lingkungan masyarakat. Hasil tersebut juga dapat menjadi landasan untuk mempertahankan pola kerja intelijen yang terbukti efektif, sekaligus mengembangkan aspek-aspek tertentu guna memperkuat sistem deteksi dini dan meningkatkan ketepatan analisis pada periode berikutnya.

b. Perbandingan Capaian 2025 dengan tahun 2024

Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2024, karena indikator ini belum tersedia dan belum digunakan sebagai ukuran kinerja pada tahun 2024. Indikator tersebut baru mulai diterapkan pada tahun 2025, sehingga tidak terdapat baseline atau data pembanding dari tahun sebelumnya. Oleh karena itu, capaian 133,33% pada tahun 2025 menjadi nilai awal (baseline) untuk digunakan sebagai acuan evaluasi dan peningkatan pada tahun-tahun berikutnya.

- c. Perbandingan capaian Tahun 2025 dengan Target jangka menengah dalam dokumen Renstra

Tabel 16. Perbandingan Capaian IKK 15.1 dengan Renstra

Indikator	Capaian (2025) & Target Jangka Menengah				
	2025	2026	2027	2028	2029
Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen	133,33%	80%	85%	90%	95%

Berdasarkan dokumen **Rencana Strategis Lapas Kelas IIA Watampone Tahun 2025-2029**, target kinerja untuk indikator Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen ditetapkan sebesar **75%**. Realisasi pada periode pelaksanaan menunjukkan angka **100%**, sehingga menghasilkan capaian sebesar **133,33%**. Deviasi positif yang sangat signifikan ini karena Pelaksanaan Operasi Intelijen yang mencerminkan bahwa seluruh rangkaian kegiatan deteksi dini, pengumpulan informasi, dan analisis situasi telah berjalan secara terarah dan memberikan hasil yang lebih optimal dari perkiraan awal. Capaian yang jauh melampaui target ini sekaligus menjadi landasan (baseline) yang kuat dalam merumuskan arah peningkatan program pembinaan pada periode selanjutnya sebagaimana telah digariskan dalam Renstra Tahun 2025-2029

- d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator kinerja kegiatan ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen hanya dilakukan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

- e. Analisis Faktor Keberhasilan

Keberhasilan Pelaksanaan Operasi Intelijen, yakni mekanisme pemantauan, pola koordinasi antarpetugas, serta sistem pelaporan intelijen telah diterapkan dengan konsisten sehingga informasi strategis dapat dihimpun secara cepat, tepat, dan berkelanjutan. Selain itu, tingginya kualitas produk intelijen yang dihasilkan menandakan adanya peningkatan kemampuan petugas dalam membaca potensi kerawanan, mengolah data menjadi temuan yang akurat, serta memberikan rekomendasi yang relevan bagi pengambilan keputusan pimpinan.

- f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam Pelaksanaan Operasi Intelijen tercermin dari kemampuan petugas dalam memaksimalkan kapasitas yang tersedia tanpa harus menambah

beban anggaran maupun personel tambahan. Mekanisme kerja intelijen yang dijalankan secara berlapis meliputi deteksi dini, pengumpulan informasi, pemantauan area, serta pelaporan internal telah dirancang sedemikian rupa sehingga setiap petugas mampu menjalankan peran strategisnya secara optimal. Pemanfaatan struktur organisasi yang sudah ada, termasuk penguatan fungsi regu jaga dan koordinasi lintas subseksi, memungkinkan proses monitoring dilakukan secara terus-menerus tanpa memerlukan intervensi eksternal. Selain itu, kemampuan petugas dalam mengolah informasi secara cepat dan akurat menunjukkan bahwa investasi pada peningkatan kompetensi sebelumnya telah memberikan dampak nyata terhadap kualitas produk intelijen yang dihasilkan. Sinergi antarpetugas yang kuat, didukung oleh alur pelaporan yang sederhana namun efektif, menjadikan penggunaan waktu, tenaga, dan perangkat operasional lebih efisien. Kondisi ini memastikan bahwa kegiatan intelijen dapat berjalan intensif dan responsif, tetapi tetap hemat sumber daya dan mampu memberikan kontribusi maksimal terhadap stabilitas keamanan dan pencapaian kinerja organisasi.

g. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pencapaian kinerja dalam Pelaksanaan Operasi Intelijen sangat dipengaruhi oleh keberlangsungan berbagai program pendukung yang secara langsung memperkuat kesiapan, responsivitas, dan ketajaman analisis petugas. Program Pembinaan Fisik dan Mental bagi petugas memberikan fondasi penting dalam menjaga stamina, ketangguhan mental, serta kemampuan berpikir cepat tiga unsur yang sangat dibutuhkan dalam menjalankan fungsi intelijen secara efektif. Di sisi lain, kerja sama dengan Brimob dalam kegiatan patroli sambang berperan sebagai bentuk penguatan eksternal yang membantu memperluas cakupan pemantauan, meningkatkan visibilitas pengamanan, dan memberikan efek preventif terhadap potensi gangguan keamanan. Tidak kalah penting, penguatan rutin oleh Kalapas maupun Kakanwil setiap kali melakukan kunjungan menjadi faktor signifikan dalam menjaga motivasi, kedisiplinan, dan konsistensi pelaksanaan tugas. Dukungan moral, arahan langsung, serta evaluasi lapangan dari pimpinan memastikan setiap petugas tetap berada pada standar kerja yang tinggi. Secara keseluruhan, kombinasi antara pembinaan internal, kolaborasi eksternal, dan pengawasan pimpinan ini menciptakan ekosistem yang mendukung keberhasilan kinerja; namun apabila salah satu unsur tidak berjalan konsisten, potensi penurunan efektivitas dan keterlambatan deteksi dini dapat menjadi faktor penghambat dalam pencapaian target kinerja.

## 2. IKK 15.2. Indeks Pencegahan

Indikator Indeks Pencegahan merupakan ukuran penilaian maturitas (mengarahkan kondisi optimal) penyelenggaraan pencegahan keamanan dan ketertiban, melalui:

1. Pembinaan Prosedur (Menurunnya jumlah petugas yang melakukan pelanggaran SOP) (50% bobot nilai)

- A : Jumlah petugas yang melakukan pelanggaran SOP dibagi jumlah petugas (25% bobot nilai).

- B : Jumlah petugas yang mendapatkan habituasi dibagi jumlah petugas (25% bobot nilai).

2. Pemeliharaan Keamanan (50% bobot nilai)

- Penggeledahan (C)

Jumlah kegiatan yang hanya terdapat temuan dibagi total kegiatan penggeledahan (25% bobot nilai).

- Tes Urin (D)

Jumlah Tahanan, Anak, dan Warga Binaan yang positif narkoba dibagi total Tahanan, Anak, dan Warga yang melaksanakan tes narkoba/sampling (25% bobot nilai).

### a). Jumlah Petugas Yang Tidak Melakukan Pelanggaran SOP

Tabel 17. Jumlah petugas yang tidak melakukan pelanggaran SOP

No.	Bulan	Jumlah Petugas yang tidak melakukan pelanggaran SOP	Jumlah Petugas
1.	Juli - Desember	115	115

### b). Jumlah Petugas yang Mendapatkan Habituasi

Tabel 18. Jumlah Petugas yang mendapatkan habituasi

No.	Bulan	Jumlah tindak lanjut	Jumlah Rekomendasi
1.	Juli - Desember	NIHIL	NIHIL

### c). Jumlah kegiatan yang hanya terdapat temuan

Tabel 19. Jumlah kegiatan yang terdapat temuan

No.	Bulan	Jumlah kegiatan yang hanya terdapat temuan	Total kegiatan Penggeledahan
1.	Juli	1	1
2.	Agustus	3	3
3.	September	2	2
4.	Oktober	2	2
5.	November	2	2
6.	Desember	0	0
	Total	10	10

### d). Jumlah warga binaan yang negative narkoba

Tabel 20. Jumlah warga binaan yang negative narkoba

No.	Bulan	Jumlah warga binaan yang negative narkoba	Tahanan dan Warga Binaan melaksanakan tes narkoba
1.	Juli	71	71
2.	Agustus	26	26
3.	September	17	17
4.	Oktober	19	19
5.	November	12	12
6.	Desember	2	2
	Total	147	147

#### FORMULASI PERHITUNGAN

$$\text{Indeks} = \left( \frac{PP + PK}{25\%} \right)$$

$$\text{Indeks} = \frac{0.75}{0.25} = 3.0$$

#### a. Perbandingan target dan capaian

Tabel 21. Perbandingan Target dan Capaian IKK 15.2

No.	Indikator	Realisasi	Target	Capaian
1.	Indeks Pencegahan	3.0	2.6	115%

Indeks Pencegahan menunjukkan kinerja yang jauh melampaui target yang telah ditetapkan. Pada awal periode, indikator ini ditargetkan mencapai **Indeks 2.6**, namun realisasi yang diperoleh justru mencapai **Indeks 3.0**. Selisih yang besar antara target dan realisasi tersebut menghasilkan tingkat capaian sebesar **115%**.

Besarnya capaian pada indikator Indeks Pencegahan mencerminkan bahwa rangkaian upaya preventif yang meliputi kepatuhan pegawai terhadap SOP, efektivitas pelaksanaan pengeledahan, serta pemeriksaan narkoba bagi warga binaan telah berjalan secara konsisten dan memberikan hasil yang lebih baik dari proyeksi awal. Tingginya angka kepatuhan pegawai menunjukkan bahwa standar operasional tidak hanya dipahami, tetapi juga diterapkan secara disiplin dalam aktivitas sehari-hari, sehingga potensi pelanggaran maupun penyimpangan prosedur dapat ditekan secara signifikan.

Pada aspek pengeledahan, realisasi temuan yang relevan menggambarkan bahwa proses pemeriksaan telah dilakukan secara terarah, menyeluruh, dan berbasis risiko. Keberhasilan ini menandakan bahwa pola kerja tim keamanan, mekanisme koordinasi, serta metode pengawasan berbasis intelijen telah dimanfaatkan secara optimal untuk memetakan area rawan dan mendeteksi upaya penyelundupan barang terlarang. Sementara itu, hasil tes narkoba warga binaan yang sebagian besar menunjukkan hasil negatif semakin menguatkan bahwa kebijakan pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di dalam lapas berjalan dengan efektif, sekaligus mencerminkan keberhasilan program pengawasan dan pembinaan yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, capaian Indeks Pencegahan menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal, pola supervisi berlapis, serta budaya kepatuhan yang terus dibangun di lingkungan pemasyarakatan telah berada pada jalur yang tepat. Hasil ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan keamanan dan ketertiban, serta memperlihatkan bahwa langkah-langkah preventif yang diterapkan mampu meminimalkan kerawanan dan menurunkan potensi gangguan. Temuan ini juga dapat menjadi dasar untuk mempertahankan praktik terbaik yang telah terbukti efektif sekaligus menyempurnakan aspek-aspek tertentu guna memperkuat integritas sistem pengawasan pada periode berikutnya.

b. Perbandingan Capaian 2025 dengan Tahun 2024

Indeks Pencegahan tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2024, karena indikator ini belum tersedia dan belum digunakan sebagai ukuran kinerja pada tahun 2024. Indikator tersebut baru mulai diterapkan pada tahun 2025, sehingga tidak terdapat baseline atau data pembanding dari tahun sebelumnya. Oleh karena itu, capaian 115% pada tahun 2025 menjadi nilai awal (baseline) untuk digunakan sebagai acuan evaluasi dan peningkatan pada tahun-tahun berikutnya.

- c. Perbandingan capaian Tahun 2025 dengan Target jangka menengah dalam dokumen Resntra

Tabel 22. Perbandingan Capaian IKK 15.2 dengan Resntra

Indikator	Capaian (2025) & Target Jangka Menengah				
	2025	2026	2027	2028	2029
Indeks Pencegahan	3.0	2.8	3.0	3.2	3.4

Berdasarkan dokumen **Rencana Strategis Lapas Kelas IIA Watampone Tahun 2025-2029**, target kinerja untuk indikator Indeks Pencegahan ditetapkan sebesar **Indeks 2.6**. Realisasi pada periode pelaksanaan menunjukkan angka **Indeks 3.0**, sehingga menghasilkan capaian sebesar **115%**. Deviasi positif yang sangat signifikan ini karena metode pencegahan yang mencerminkan bahwa rangkaian upaya preventif yang meliputi kepatuhan pegawai terhadap SOP, efektivitas pelaksanaan pengeledahan, serta pemeriksaan narkoba bagi warga binaan telah berjalan secara konsisten dan memberikan hasil yang lebih baik dari proyeksi awal. Capaian yang jauh melampaui target ini sekaligus menjadi landasan (baseline) yang kuat dalam merumuskan arah peningkatan program pembinaan pada periode selanjutnya sebagaimana telah digariskan dalam Resntra Tahun 2025-2029

- d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator kinerja kegiatan ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Indeks Pencegahan hanya dilakukan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

- e. Analisis Faktor Keberhasilan

Keberhasilan dalam Indeks Pencegahan ini menandakan bahwa pola kerja tim keamanan, mekanisme koordinasi, serta metode pengawasan berbasis intelijen telah dimanfaatkan secara optimal untuk memetakan area rawan dan mendeteksi upaya penyelundupan barang terlarang misalnya memantau percakapan warga binaan ketika menggunakan Layanan Telepon. Selain itu, pemantauan area kunjungan dan pengunjung yang dilaksanakan secara ketat membantu mengurangi factor-faktor yang bisa mengganggu keamanan dan ketertiban.

- f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan upaya pencegahan di Lapas tercermin dari kemampuan petugas memaksimalkan prosedur dan perangkat yang tersedia tanpa memerlukan penambahan personel maupun anggaran khusus. Pelaksanaan pengeledahan barang di luar area lapas sebelum pengunjung memasuki ruang kunjungan merupakan strategi yang sangat efektif karena mampu menyaring potensi barang terlarang

sejak tahap awal, sehingga mengurangi beban pengawasan di dalam area inti lapas. Demikian pula, pengeledahan terhadap barang milik warga binaan setelah proses kunjungan dan sebelum mereka kembali ke blok hunian memastikan tidak ada benda berisiko yang lolos ke lingkungan internal, sehingga meningkatkan keamanan tanpa memerlukan metode tambahan yang lebih kompleks.

Penerapan langkah-langkah tersebut memperlihatkan bahwa prosedur sederhana namun konsisten dapat menghasilkan kontrol keamanan yang kuat. Dengan memanfaatkan petugas yang sudah bertugas pada pos pemeriksaan dan regu jaga, kegiatan pengeledahan dapat dijalankan secara teratur tanpa menambah tekanan berlebih pada personel. Selain itu, integrasi antara hasil pemeriksaan fisik, pemantauan area kunjungan, dan pengawasan berbasis intelijen mengoptimalkan pemanfaatan waktu, tenaga, dan informasi yang tersedia. Sinergi ini menunjukkan bahwa sumber daya dikelola secara tepat guna dan efisien, sekaligus memberikan kontribusi besar terhadap keberhasilan upaya pencegahan serta terciptanya kondisi lapas yang lebih aman dan terkendali.

g. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Berbagai program pengamanan yang diterapkan berkontribusi langsung terhadap keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja, terutama melalui penguatan disiplin, kewaspadaan, dan kontrol situasional di lingkungan Lapas. Pelaksanaan kontrol rutin di area blok hunian membantu mendeteksi potensi kerawanan sejak dini, sementara penerapan larangan membawa HP melewati pintu 3 mencegah penyalahgunaan alat komunikasi yang dapat memicu gangguan keamanan. Di sisi lain, penguatan melalui apel pagi meliputi arahan kedisiplinan, kewaspadaan, dan integritas mendorong petugas untuk tetap fokus dan bekerja sesuai prosedur. Ketiga program ini saling melengkapi metode pencegahan lainnya sehingga membentuk sistem pengawasan yang lebih komprehensif; namun jika tidak dilaksanakan secara konsisten, potensi terjadinya celah keamanan dapat meningkat dan berdampak pada kurang optimalnya pencapaian kinerja.

### 3. IKK 15.3. Indeks Penindakan

Indikator Indeks Penindakan merupakan gabungan dari berbagai aspek terkait upaya penindakan yang dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tertib di dalam lembaga pemasyarakatan. Indikator ini terbagi menjadi dua aspek, yakni sebagai berikut:

#### 1). Menurunnya Gangguan Keamanan & Ketertiban

Menghitung Jumlah Anak, Anak Binaan, Narapidana & Tahanan yang tidak mendapatkan sanksi atas pelanggaran gangguan kamtib dibagi total Anak, Anak Binaan, Narapidana & Tahanan (65% bobot nilai)

#### 2). Pelarian

Jumlah kasus pelarian yang terselesaikan dibagi jumlah kasus pelarian (35% bobot nilai)

#### a). Jumlah Narapidana dan Tahanan yang mendapatkan sanksi atas pelanggaran

Tabel 23. Jumlah WBP yang mendapatkan Sanksi

No.	Bulan	Jumlah Narapidana dan Tahanan yang Tidak Mendapatkan Anksi atas Pelanggaran	Total Narapidana dan Tahanan
1.	Juli	727	727
2.	Agustus	721	721
3.	September	727	727
4.	Oktober	696	696
5.	November	684	684
6.	Desember	693	693
	Total	4.248	4.248

#### b). Jumlah Kasus Pelarian

Tabel 24. Kasus Pelarian

No.	Bulan	Jumlah Kasus Pelarian yang terselesaikan	Jumlah Kasus Pelarian
1.	Juli - Desember	NIHIL	NIHIL

#### FORMULASI PERHITUNGAN

$$\text{Nilai} = \frac{(GKK) + (PLR)}{25\%}$$

$$\text{Nilai} = \frac{0.65 + 0.35}{25\%} = 4$$

a. Perbandingan target dan capaian

Tabel 25. Perbandingan Target dan Capaian IKK 15.3

No.	Indikator	Realisasi	Target	Capaian
1.	Indeks Penindakan	4.0	2.8	142%

Indeks Pencegahan menunjukkan kinerja yang jauh melampaui target yang telah ditetapkan. Pada awal periode, indikator ini ditargetkan mencapai **Indeks 2.8**, namun realisasi yang diperoleh justru mencapai **Indeks 4.0**. Selisih yang besar antara target dan realisasi tersebut menghasilkan tingkat capaian sebesar **142%**.

Capaian pada indikator Indeks Penindakan menunjukkan bahwa mekanisme penegakan aturan, pemberian sanksi, serta langkah-langkah penuntasan pelanggaran telah berjalan dengan terstruktur dan konsisten sepanjang periode pelaksanaan. Meskipun jumlah kasus pelanggaran yang terjadi relatif rendah, termasuk nihilnya insiden pelarian, hal tersebut justru memperlihatkan bahwa sistem pengendalian dan pengawasan di dalam lapas berfungsi secara efektif. Kondisi ini bukan sekadar cerminan situasi yang kondusif, tetapi juga menunjukkan bahwa kesiapsiagaan petugas, ketegasan penerapan tata tertib, serta kualitas pembinaan turut berperan dalam menjaga stabilitas lingkungan pemasyarakatan.

Pemberian sanksi bagi warga binaan yang melakukan pelanggaran, meskipun jumlahnya terbatas, tetap dilaksanakan secara terukur, proporsional, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketegasan ini menunjukkan bahwa proses penindakan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi menjadi instrumen pembinaan yang memberi efek jera sekaligus mendorong kepatuhan terhadap aturan. Dokumentasi setiap tindakan serta proses pengambilan keputusan yang transparan turut mencerminkan komitmen petugas dalam menegakkan integritas sistem pemasyarakatan.

Sementara itu, nihilnya kasus pelarian bukan berarti aktivitas penindakan berhenti pada level administratif. Justru, keadaan tersebut menggambarkan bahwa upaya pencegahan dan kesiapan untuk melakukan penuntasan pelarian telah benar-benar tertanam dalam pola kerja petugas. Kekuatan patroli rutin, keandalan pengawasan berbasis teknologi, serta koordinasi internal yang solid memastikan bahwa potensi pelarian dapat diidentifikasi dan ditekan sebelum berkembang menjadi insiden. Ketika indikator penuntasan pelarian tetap menunjukkan capaian maksimal walaupun tanpa adanya kasus, hal itu menjadi bukti bahwa struktur penindakan telah disiapkan secara komprehensif dan siap digunakan kapan pun dibutuhkan.

Secara menyeluruh, capaian pada indikator Indeks Penindakan memperlihatkan bahwa keseimbangan antara ketegasan, konsistensi prosedur, dan pendekatan pembinaan telah

berhasil diterapkan. Hasil ini memperkuat stabilitas keamanan lapas serta memastikan bahwa setiap pelanggaran ditangani secara profesional. Pada saat yang sama, struktur penindakan yang kuat dan siap digunakan tetap dipertahankan, sehingga memberikan jaminan bahwa apabila muncul potensi gangguan di kemudian hari, respons yang cepat, akurat, dan tepat sasaran dapat langsung dilakukan.

b. Perbandingan Capaian 2025 dengan Tahun 2024

Indeks Penindakan tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2024, karena indikator ini belum tersedia dan belum digunakan sebagai ukuran kinerja pada tahun 2024. Indikator tersebut baru mulai diterapkan pada tahun 2025, sehingga tidak terdapat baseline atau data pembanding dari tahun sebelumnya. Oleh karena itu, capaian 142% pada tahun 2025 menjadi nilai awal (baseline) untuk digunakan sebagai acuan evaluasi dan peningkatan pada tahun-tahun berikutnya.

c. Perbandingan capaian Tahun 2025 dengan Target jangka menengah dalam dokumen Resnra

Tabel 26. Perbandingan Capaian IKK 15.3 dengan Resnra

Indikator	Capaian (2025) & Target Jangka Menengah				
	2025	2026	2027	2028	2029
Indeks Pencegahan	4.0	2.96	3.04	3.12	3.2

Berdasarkan dokumen **Rencana Strategis Lapas Kelas IIA Watampone Tahun 2025-2029**, target kinerja untuk indikator Indeks Pencegahan ditetapkan sebesar **Indeks 2.8**. Realisasi pada periode pelaksanaan menunjukkan angka **Indeks 4.0**, sehingga menghasilkan capaian sebesar **142%**. Mekanisme penegakan aturan, pemberian sanksi, serta langkah-langkah penuntasan pelanggaran telah berjalan dengan terstruktur dan konsisten sepanjang periode pelaksanaan. Capaian yang jauh melampaui target ini sekaligus menjadi landasan (baseline) yang kuat dalam merumuskan arah peningkatan program pembinaan pada periode selanjutnya sebagaimana telah digariskan dalam Resnra Tahun 2025-2029

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator kinerja kegiatan ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Indeks Penindakan hanya dilakukan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

e. Analisis Faktor Keberhasilan

Keberhasilan dalam indikator Indeks Penindakan memperlihatkan bahwa keseimbangan antara ketegasan, konsistensi prosedur, dan pendekatan pembinaan telah berhasil diterapkan. Hasil ini memperkuat stabilitas keamanan lapas serta memastikan bahwa setiap pelanggaran ditangani secara profesional.

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan Indeks Penindakan tercermin dari optimalnya pemanfaatan personel dan prosedur yang sudah ada tanpa memerlukan tambahan sumber daya baru. Kontrol rutin ke dalam area blok hunian dilakukan dengan mengandalkan regu jaga yang bertugas, sehingga kegiatan pengawasan dapat berlangsung terus-menerus tanpa memerlukan struktur tambahan. Petugas pos juga melaksanakan pengawasan ketat di area pos masing-masing, sehingga titik-titik strategis tetap terpantau secara efektif melalui penempatan personel yang sudah terjadwal. Dengan memaksimalkan fungsi petugas yang ada, sistem pengendalian internal dapat berjalan kuat dan responsif, sementara kebutuhan operasional tetap efisien. Integrasi antara kontrol rutin, pengawasan pos, dokumentasi penindakan, serta koordinasi internal menjadikan alur penegakan aturan lebih terarah dan hemat tenaga, namun tetap mampu menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban secara optimal.

g. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja pada Indeks Penindakan turut didukung oleh sejumlah program pengawasan yang berjalan secara konsisten dan terstruktur. Penempatan petugas piket sebanyak satu orang untuk shift siang maupun malam membantu memastikan adanya personel yang siap menangani situasi mendesak dan memantau dinamika harian secara berkelanjutan. Selain itu, dukungan regu jaga dari golongan staf pada setiap hari libur memperkuat kesiapan dan ketersediaan tenaga pengamanan pada periode rawan ketika intensitas kegiatan cenderung menurun. Pengawasan juga diperkuat melalui keterlibatan langsung para pejabat yang rutin masuk ke lapas, termasuk pada malam hari, untuk memeriksa kondisi petugas, mengevaluasi situasi di blok hunian, serta memastikan disiplin dan kepatuhan terhadap prosedur tetap terjaga. Sinergi berbagai program tersebut membentuk sistem kontrol yang komprehensif, sehingga pelanggaran dapat diminimalkan dan stabilitas keamanan tetap terjaga; sebaliknya, jika salah satu unsur pengawasan ini tidak berjalan, efektivitas penindakan dapat menurun dan potensi gangguan keamanan lebih sulit dikendalikan.



LAPAS KELAS IIA WATAMPONE

# Meningkatnya Kualitas Kesehatan Anak, Anak Binaan, Tahanan, dan Narapidana (SK 16)



**C. SK 16. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Anak, Anak Binaan, Tahanan, dan Narapidana**



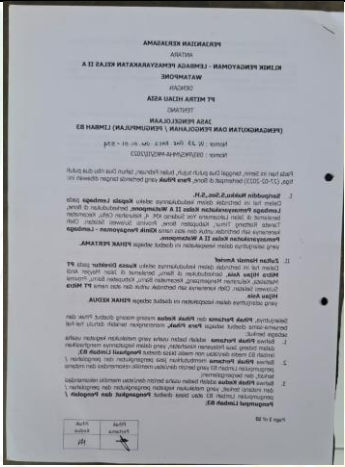

**1. IKK 16.1 Persentase Upt Pemasarakatan dengan Indeks Kesehatan lingkungan dengan kategori baik**








Indikator Persentase UPT Pemasarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik merupakan ukuran proporsi UPT Pemasarakatan yang berhasil memenuhi standar kesehatan lingkungan yang ditetapkan, sehingga menciptakan kondisi yang lebih sehat dan layak bagi penghuni dan petugas. Adapun Indeks kesehatan lingkungan dinilai berdasarkan :




1. Sistem Pengelolaan Sampah di UPT Pemasarakatan (bobot 10%)
2. Sistem Penyelenggaraan Air Bersih di UPT Pemasarakatan (bobot 30%)
3. Sistem Pengelolaan Air Limbah di UPT Pemasarakatan (bobot 15%)
4. Sistem Pengelolaan Pencemaran Udara di UPT Pemasarakatan (bobot 5%)
5. Sistem Pengendalian vektor dan hewan pembawa penyakit (bobot 10%)
6. Sistem Penyelenggaraan Keamanan Pangan di UPT Pemasarakatan (bobot 30%)





Tabel 27. Indikator Kesehatan Lingkungan dengan Kategori Baik

No.	Kegiatan	Jawaban		Data Dukung
		Ya	Tidak	
<b>A. SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH DI UPT PEMASYARAKATAN (BOBOT 10%)</b>				
1.	UPT Memiliki TIM Pengelola Sampah di UPT Pemasarakatan		√	
2.	UPT Melakukan Penyuluhan Pemilihan Sampah Kepada WBP di UPT Pemasarakatan		√	
3.	UPT melakukan penimbangan dan pencatatan sampah rutin		√	

4.	UPT memiliki program pengolahan sampah	√		 
5.	UPT memiliki PKS dengan Dinas Kesehatan/Mitra Penggiat Lingkungan terkait pengelolaan sampah	√		
6.	UPT Memiliki PKS dengan pihak ke-3 terkait pengelolaan sampah B3 Infeksius (Klinik)	√		
7.	UPT memiliki PKS dengan pihak ke-3 terkait pengelolaan sampah B3 Non Infeksius (Minyak Jelantah)	√		
<b>B. SISTEM PENYELENGGARAAN AIR BERSIH DI UPT PEMASYARAKATAN (BOBOT 30%)</b>				
1.	UPT Memiliki sertifikat kelayakan air minum yang berlaku S.D. Desember 2025	√		
<b>C. SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DI UPT PEMASYARAKATAN (BOBOT 15%)</b>				
1.	UPT memiliki Sistem Grease Trap di dapur	√		
<b>D. SISTEM PENGELOLAAN PENCEMARAN UDARA DI UPT PEMASYARAKATAN (BOBOT 5%)</b>				

1.	UPT memiliki <i>System Cooker Hood</i> di dapur	√		
<b>E. SISTEM PENGENDALIAN VEKTOR DAN HEWAN PEMBAWA PENYAKIT DI UPT PEMASYARAKATAN (BOBOT 10%)</b>				
1.	Apakah UPT saudara telah menguras dan menyikat toilet di area:			
	a. Ruang/Kantor Kepala UPT Pas	√		
	b. Ruang layanan pendaftaran kunjungan, informasi dan pengaduan	√		
	c. Khusus Pegawai	√		
	d. Ruang Kunjungan	√		
	e. Portir/Regu Pengamanan	√		
	f. Balai Latihan Kerja	√		

	g. Tempat Ibadah	√		
	h. Ruang Aula	√		
	i. Dapur	√		
	j. Klinik	√		
	k. Blok Hunian	√		
	l. Kamar Hunian	√		
2.	Apakah UPT saudara telah menutup toren/tempat penampungan air di:			
	a. Dapur	√		

	b. Blok Hunian	√		
	c. Gedung Perkantoran	√		
3.	Apakah UPT saudara telah memiliki tim program juru pemantau jentik (Jumantik)? Jika jawaban Ya, lanjut ke pertanyaan 4	√		
4.	Apakah UPT saudara telah melaksanakan program jumantik.	√		
<b>F. SISTEM PENYELENGGARAAN KEAMANAN PANGAN DI UPT PEMASYARAKATAN (BOBOT 30%)</b>				
1.	UPT memiliki sertifikat <i>Laik Higiene</i> sanifasi dapur yang masih berlaku s.d. 31 Desember	√		
2.	Pejabat Struktural yang membawahi dapur memiliki sertifikat pelatihan keamanan pangan	√		

3.	Asisten coordinator dapur memiliki sertifikat pelatihan keamanan pangan	√	
----	---	---	--

#### FORMULASI PERHITUNGAN

NO.	INDIKATOR	FORMULASI	% PENILAIAN KINERJA
A.	SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH DI UPT PEMASYARAKATAN	$\frac{2}{7} \times 100\%$	2.86%
B.	SISTEM PENYELENGGARAAN AIR BERSIH DI UPT PEMASYARAKATAN	$\frac{1}{1} \times 100\%$	30%
C.	SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DI UPT PEMASYARAKATAN	$\frac{0}{1} \times 100\%$	0%
D.	SISTEM PENGELOLAAN PENCEMARAN UDARA DI UPT PEMASYARAKATAN	$\frac{1}{1} \times 100\%$	5%
E.	SISTEM PENGENDALIAN VEKTOR DAN HEWAN PEMBAWAPENYAKIT DI UPT PEMASYARAKATAN	$\frac{15}{17} \times 100\%$	8.82%
F.	SISTEM PENYELENGGARAAN KEAMANAN PANGAN DI UPT PEMASYARAKATAN	$\frac{3}{3} \times 100\%$	30%
<b>Total</b>			<b>76.68%</b>

Tabel 28. Formulasi Perhitungan IKK 16.1

#### a. Perbandingan target dan capaian

Tabel 29. Perbandingan Target dan Capaian IKK 16.1

No.	Indikator	Realisasi	Target	Capaian
1.	Persentase Upt Pemasarakatan dengan Indeks Kesehatan lingkungan dengan kategori baik	76.68%	10%	766,8%

Persentase Upt Pemasarakatan dengan Indeks Kesehatan lingkungan dengan kategori baik menunjukkan kinerja yang jauh melampaui target yang telah ditetapkan. Pada awal periode, indikator ini ditargetkan mencapai **10%**, namun realisasi yang diperoleh justru mencapai **76,68%**. Selisih yang besar antara target dan realisasi tersebut menghasilkan tingkat capaian sebesar **766,8%**.

Capaian indeks kesehatan lingkungan di UPT Pemasaryakatan menunjukkan bahwa beberapa komponen utama telah dikelola dengan baik sesuai bobot penilaiannya, meskipun masih terdapat indikator yang membutuhkan perhatian serius. Pada komponen sistem penyelenggaraan air bersih dengan bobot 30%, capaian penuh sebesar 30% mencerminkan bahwa kebutuhan air bersih dan air minum telah terpenuhi dengan baik. Air minum yang digunakan didatangkan dari pihak luar yang telah memiliki sertifikat, sehingga aspek kualitas dan keamanan air dapat dipertanggungjawabkan dan mendukung kesehatan warga binaan serta petugas.

Capaian optimal juga terlihat pada sistem penyelenggaraan keamanan pangan dengan bobot 30% dan realisasi 30%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan pangan di dapur Lapas telah memenuhi standar, didukung oleh kepemilikan sertifikat keamanan pangan dan laik higiene baik oleh dapur maupun petugas pengelola. Hal ini menjadi fondasi penting dalam pencegahan penyakit berbasis makanan serta pemenuhan hak dasar warga binaan di bidang kesehatan.

Namun demikian, beberapa indikator lain masih menunjukkan capaian yang relatif rendah. Sistem pengelolaan sampah dengan bobot 10% hanya mencapai 2,86%, yang mengindikasikan bahwa pengelolaan sampah belum berjalan secara komprehensif. Saat ini, Lapas Watampone baru memiliki perjanjian kerja sama terkait limbah B3 infeksius serta pemanfaatan sampah menjadi kerajinan dan pupuk. Di sisi lain, belum terdapat tim pengelola sampah khusus, belum dilakukan penimbangan dan pencatatan sampah, belum ada sosialisasi pengelolaan sampah, serta belum tersedia perjanjian kerja sama dengan pengelola sampah umum maupun perjanjian kerja sama terkait limbah minyak, sehingga sistem pengelolaan sampah masih bersifat terbatas.

Pada sistem pengelolaan air limbah dengan bobot 15%, capaian tercatat 0%, yang menunjukkan belum terpenuhinya aspek penting dalam pengelolaan limbah cair. Salah satu faktor utamanya adalah dapur Lapas yang belum dilengkapi dengan grease trap, sehingga pengelolaan limbah cair dapur belum memenuhi standar dan berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan.

Sementara itu, sistem pengelolaan pencemaran udara dengan bobot 5% berhasil mencapai 5%, yang menunjukkan bahwa upaya pengendalian telah dilakukan secara minimal namun tepat sasaran. Hal ini didukung dengan keberadaan saluran cooker hood di dapur Lapas Watampone yang berfungsi mengurangi asap dan bau hasil aktivitas memasak.

Pada indikator sistem pengendalian vektor dan hewan pembawa penyakit dengan bobot 10%, capaian sebesar 8,82% menunjukkan bahwa sebagian besar upaya pengendalian telah dilaksanakan. Pembersihan rutin terutama di area toilet dilakukan secara konsisten, termasuk

pembersihan toren air yang dilaksanakan sekali dalam sebulan. Namun demikian, belum terbentuknya tim jumentik menjadi faktor pembatas dalam optimalisasi pengendalian vektor, khususnya nyamuk sebagai pembawa penyakit.

Secara keseluruhan, capaian ini menggambarkan bahwa fondasi pengelolaan kesehatan lingkungan di Lapas Kelas IIA Watampone telah terbentuk, terutama pada aspek air bersih dan keamanan pangan. Dengan melakukan penguatan pada pengelolaan sampah, penyediaan sarana pengolahan air limbah seperti grease trap, serta pembentukan tim pengendali vektor, kualitas kesehatan lingkungan di UPT Pemasarakatan berpotensi meningkat secara lebih merata dan berkelanjutan pada periode selanjutnya.

b. Perbandingan Capaian 2025 dengan Tahun 2024

Persentase Upt Pemasarakatan dengan Indeks Kesehatan lingkungan dengan kategori baik tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2024, karena indikator ini belum tersedia dan belum digunakan sebagai ukuran kinerja pada tahun 2024. Indikator tersebut baru mulai diterapkan pada tahun 2025, sehingga tidak terdapat baseline atau data pembandingan dari tahun sebelumnya. Oleh karena itu, capaian 805% pada tahun 2025 menjadi nilai awal (baseline) untuk digunakan sebagai acuan evaluasi dan peningkatan pada tahun-tahun berikutnya.

c. Perbandingan capaian Tahun 2025 dengan Target jangka menengah dalam dokumen Resntra

Tabel 30. Perbandingan Capaian IKK 16.1 dengan Resntra

Indikator	Capaian (2025) & Target Jangka Menengah				
	2025	2026	2027	2028	2029
Indeks Pencegahan	766.8%	20%	30%	40%	50%

Berdasarkan dokumen **Rencana Strategis Lapas Kelas IIA Watampone Tahun 2025-2029**, target kinerja untuk indikator Persentase Upt Pemasarakatan dengan Indeks Kesehatan lingkungan dengan kategori baik ditetapkan sebesar **10%**. Realisasi pada periode pelaksanaan menunjukkan angka **76.68%**, sehingga menghasilkan capaian sebesar **766.8%**. Deviasi positif yang sangat signifikan menunjukkan bahwa fondasi manajemen kesehatan lingkungan di UPT Pemasarakatan telah terbentuk cukup kuat. Capaian yang jauh melampaui target ini sekaligus menjadi landasan (baseline) yang kuat dalam merumuskan arah peningkatan program pembinaan pada periode selanjutnya sebagaimana telah digariskan dalam Resntra Tahun 2025-2029.

#### d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator kinerja kegiatan ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase Upt Pemasarakatan dengan Indeks Kesehatan lingkungan dengan kategori baik hanya dilakukan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

#### e. Analisis Faktor Keberhasilan

Keberhasilan dalam Persentase Upt Pemasarakatan dengan Indeks Kesehatan lingkungan dengan kategori baik ini menandakan bahwa komitmen pelaksana layanan dalam menjalankan prosedur operasional secara konsisten, termasuk pemeliharaan sarana dapur dan kebersihan lingkungan rutin, turut memperkuat capaian kinerja. Dukungan kepemilikan sertifikasi serta penerapan pengawasan internal menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas layanan kesehatan lingkungan meskipun masih terdapat keterbatasan pada beberapa indikator lainnya.

#### f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya di Lapas Kelas IIA Watampone tercermin melalui pemanfaatan warga binaan dalam kegiatan pembersihan lingkungan, terutama pada area hunian, toilet, dapur, dan fasilitas umum. Keterlibatan warga binaan membantu mengoptimalkan keterbatasan jumlah petugas sekaligus menekan kebutuhan anggaran operasional kebersihan. Selain meningkatkan efisiensi, pola ini juga mendukung pembinaan kemandirian dan pembentukan kedisiplinan warga binaan melalui aktivitas yang bersifat produktif dan berkelanjutan.

#### g. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja di Lapas Kelas IIA Watampone antara lain adalah penyelenggaraan air bersih dan keamanan pangan yang dilaksanakan secara terstandar. Ketersediaan air minum bersertifikat, penerapan hygiene sanitasi dapur, serta kepemilikan sertifikat keamanan pangan oleh petugas menjadi faktor utama yang mendorong tercapainya nilai optimal pada indikator dengan bobot terbesar. Selain itu, pelibatan warga binaan dalam kegiatan kebersihan harian turut mendukung terciptanya lingkungan yang relatif bersih dan terkontrol meskipun dengan keterbatasan sumber daya.

Di sisi lain, terdapat program yang belum berjalan optimal sehingga berpengaruh terhadap belum maksimalnya capaian kinerja secara keseluruhan. Belum adanya sistem pengelolaan

sampah yang terstruktur, ketiadaan sarana pengolahan air limbah seperti grease trap, serta belum terbentuknya tim jumantik menjadi faktor penghambat pada indikator pengelolaan sampah, air limbah, dan pengendalian vektor. Keterbatasan sarana pendukung, kerja sama teknis, serta penguatan kelembagaan program menjadi penyebab utama belum tercapainya hasil yang diharapkan pada beberapa aspek kesehatan lingkungan.



## **2. IKK 16.2. Persentase Satker Dengan Indeks Kesehatan Fisik Dengan Kategori Baik**

Indikator Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik merupakan proporsi Satker Pemasarakatan yang dinilai memiliki kondisi kesehatan fisik yang baik bagi para penghuni (narapidana, tahanan, anak). Adapun indeks kesehatan fisik dinilai berdasarkan :

1. Sistem penyelenggaraan pemenuhan kebutuhan dasar (makanan sesuai kebutuhan gizi, pakaian, perlengkapan tidur dan perlengkapan mandi) di UPT Pemasarakatan (bobot 20%)
2. Sistem penyelenggaraan program pencegahan dan penanganan stunting di UPT Pemasarakatan (Rumah Gizi Pemasarakatan) (bobot 5%)
3. Sistem penyelenggaraan aktivitas fisik di UPT Pemasarakatan (bobot 5%)
4. Sistem Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan Dasar (Skrining Kesehatan awal, Pemeriksaan Kesehatan berkala, Pemeriksaan kesehatan Insidentil, Penanganan Penyakit tidak menular, Manajemen Obat, Pemenuhan Sarana Prasarana Klinik, Penguatan dan Pembinaan SDM Penyelenggaraan Kesehatan Dasar, Legalitas dan akreditasi Klinik, dan Kerjasama dengan pihak Klinik, Puskesmas, Rumah Sakit Setempat). (bobot 20%)
5. Sistem Penyelenggaraan layanan bagi kelompok berkebutuhan khusus (Skrining kelompok berkebutuhan khusus, penyediaan Sarana Prasarana kelompok berkebutuhan khusus, Penyelenggaraan "Posyandu", Penyuluhan bagi kelompok berkebutuhan khusus, dan Pemenuhan pelayanan Kesehatan Khusus untuk Lansia dan Penyandang Disabilitas). (bobot 10%)
6. Sistem Penyelenggaraan Pemenuhan layanan Perawatan Kesehatan Lanjutan (Kepesertaan Narapidana BPJS, JKN, KIS dan sejenisnya, Layanan Kesehatan Rujukan) (bobot 5%)
7. Sistem Penyelenggaraan Kesehatan Paliatif. (bobot 5%)
8. Sistem Penyelenggara Rehabilitasi (bobot 10%)
9. Sistem Pengendalian Penyakit Menular (bobot 20%)

### a). Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Tabel 31. Pemenuhan Kebutuhan Dasar

NO	Aspek Penilaian	Total Anak Binaan Periode Juli-Des 2025	Total Penerima Aspek	Persentase Capaian
1	Kinerja Penyelenggaraan Makanan Sesuai Kebutuhan Gizi	4.248	4.248	100%
2	Kinerja Penyelenggaraan Pakaian	4.248	4.248	100%
3	Kinerja Penyelenggaraan Perlengkapan Tidur	4.248	4.248	100%
4	Kinerja Penyelenggaraan Perlengkapan Mandi	4.248	4.248	100%

#### FORMULASI PERHITUNGAN

$$\%SKD = \sum (A \times B)$$

$$SKD = \sum (100\% \times 20\%)$$

$$SKD = 20\%$$

### b). Penyelenggaraan Program Pencegahan dan Penanganan Stunting

Tabel 32. Program Pencegahan dan Penanganan Stunting

NO	Aspek Penilaian	Persentase penilaian kinerja program posyandu Ibu dan Balita diUPT Pas	Persentase Penilaian Kinerja Program Rumah Gizi Pemasyarakatan di UPT PAS yang memiliki anak bawaan	Persentase Capaian
1	Program Pencegahan Stunting	NIHIL	NIHIL	NIHIL

### c). Penyelenggaraan Aktivitas Fisik

Tabel 33. Penyelenggaraan Aktivitas Fisik

NO	Aspek Penilaian	Jumlah Warga Binaan Dengan Kategori Aktivitas Fisik Cukup Baik	Jumlah Warga Binaan yang mengikuti Survei Penilaian Fisik	Persentase Capaian
1	Kegiatan Aktivitas Fisik Harian	4.248	4.248	100%
2	Kegiatan Olahraga Terstruktur	4.248	4.248	100%

FORMULASI PERHITUNGAN

$$SAF = \frac{4.248}{4.248} \times 100\%$$

$$SAF = 100\%$$

$$SAF = 5\%(Bobot)$$

**d). Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan Dasar**

Tabel 34. Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan Dasar

NO	Aspek Penilaian	Status Keberadaan	Keterangan	Persentase Capaian
1	Skrining Kesehatan Awal	Terpenuhi	Semua anak binaan yang masuk dilaksanakan skrining TB, HIV, Hepatitis, dan kesehatan mental. Serta dibuatkan BAPK (Berita acara pemeriksaan kesehatan)	100%
2	Pemeriksaan Kesehatan Berkala	Terpenuhi	Dilaksanakan pemeriksaan kesehatan berkala setiap bulan bersama dokter RS Umum (dr. Bidasari)	100%
3	Pemeriksaan Kesehatan Insidentil	Terpenuhi	Dilaksanakan melalui layanan ADAMA	100%
4	Penanganan Penyakit Tidak Menular	Terpenuhi	Ya, dengan kerja sama Puskesmas Bjoe	100%
5	Manajemen Obat	Terpenuhi	Ya. Distribusi obat masuk dan keluar dengan tertib	100%
6	Pemenuhan Sarana Prasarana Klinik	Terpenuhi	Sebagian. Yang kurang laboratorium sederhana, dan belum memadai untuk rawat inap.	100%
7	Penguatan dan Pembinaan SDM Penyelenggaraan Kesehatan Dasar	Terpenuhi	Sebagian, yang ada perawat 5 orang, yang kurang dokter umum, dokter gigi, farmasi, tenaga laboratorium, ahli gizi, psikolog, kesehatan lingkungan.	100%
8	Legalitas dan Akreditasi Klinik	Terpenuhi	Legalitas sudah ada dengan izin klinik, serta Akreditasi PARIPURNA	100%
9	Kerjasama dengan Klinik, Puskesmas, RS	Terpenuhi	Kerja sama dengan Puskesmas, RS, dinas kesehatan.	100%

FORMULASI PERHITUNGAN

$$SPD = 100\%$$

$$SPD = 20\%(Bobot)$$

### e). Penyelenggaraan Layanan Bagi Kelompok Berkebutuhan Khusus

Tabel 35. Penyelenggaraan Layanan Bagi Kelompok Berkebutuhan Khusus

NO	Aspek Penilaian	Status Keberadaan	Bobot	Persentase Capaian
1	Jalan yang aksesibel bagi penyandang disabilitas	Terpenuhi	15	15%
2	Ruang/blok hunian yang aksesibel bagi kelompok kebutuhan khusus/ kelompok rentan	Terpenuhi	15	15%
3	Toilet yang aksesibel bagi penyandang disabilitas	Terpenuhi	15	15%
4	Ruang dan meja pendaftaran yang aksesibel bagi penyandang disabilitas	Terpenuhi	10	10%
5	Tempat ibadah yang aksesibel bagi penyandang disabilitas	Terpenuhi	10	10%
6	Tempat parkir yang aksesibel bagi penyandang disabilitas	Terpenuhi	10	10%
7	Media informasi dan komunikasi yang aksesibel bagi penyandang disabilitas	Terpenuhi	5	5%
8	Pintu yang aksesibel bagi penyandang disabilitas	Terpenuhi	5	5%
9	Ruang ramah anak	Terpenuhi	5	5%
10	Ruang tunggu yang aksesibel bagi penyandang disabilitas	Terpenuhi	5	5%
11	Ruang menyusui	Terpenuhi	5	5%
Total				100%

#### FORMULASI PERHITUNGAN

$$SPK = 100\%$$

$$SPK = 10\% (\text{Bobot})$$

### f). Penyelenggaraan Pemenuhan Layanan Perawatan Kesehatan Lanjutan

Tabel 36. Penyelenggaraan Pemenuhan Layanan Perawatan Kesehatan Lanjutan

No.	BULAN	Jumlah warga binaan yang mendapatkan rujukan	Jumlah warga binaan yang sakit
1	JULI	1	112
2	AGUSTUS	1	103
3	SEPTEMBER	0	109
4	OKTOBER	6	101
5	NOVEMBER	2	104
6	DESEMBER	1	11
TOTAL		10	540

Tabel 37. Jumlah WBP yang terdaftar PBI JK

NO	BULAN	Jumlah warga binaan yang terdaftar dalam PBI JK	Jumlah warga binaan
1	JULI	610	726
2	AGUSTUS	600	721
3	SEPTEMBER	605	727
4	OKTOBER	590	696
5	NOVEMBER	585	684
6	DESEMBER	610	694
TOTAL		4.200	4.248

## FORMULASI PERHITUNGAN

$$\%SPL = \sum a(50\%) + \sum b(50\%)$$

$$SPL = (1,85\% \times 50\%) + (98,87\% \times 50\%)$$

$$SPL = 50,36\%$$

$$SPL = 5\% \text{ (Bobot)}$$

$$SPL = 2,52\%$$

## g). Penyelenggaraan Kesehatan Paliatif

Tabel 38. Penyelenggaraan Kesehatan Paliatif

No.	Aspek Penilaian	Status Keberadaan	Keterangan	Persentase Capaian
1	Layanan Kesehatan Paliatif	terpenuhi	Tidak ada Anak Binaan/ Anak dengan penyakit paliatif	100%

## FORMULASI PERHITUNGAN

$$SPP = 100\%$$

$$SPP = 5\% \text{ (Bobot)}$$

## h). Penyelenggaraan Rehabilitasi

Tabel 39. Penyelenggaraan Rehabilitasi

NO	Periode	Jumlah Peserta Rehabilitasi	Jumlah yang membutuhkan Rehabilitasi	Persentase Capaian
1	Juli - Desember	193	250	77,2%
Total		193	250	

## FORMULASI PERHITUNGAN

$$SPR = 77,2\%$$

$$SPR = 10\% \text{ (Bobot)}$$

$$SPR = 7,72\%$$

## i). Pengendalian Penyakit Menular

Tabel 40. Pengendalian Penyakit Menular

No.	Bulan	Jumlah Warga Binaan baru yang dilakukan skrining terhadap penyakit menular akut dan kronis	Jumlah Seluruh Warga Binaan yang Baru Masuk	Persentase Capaian
1.	Juli	43	43	100%
2.	Agustus	55	55	100%
3.	September	46	46	100%
4.	Oktober	22	22	100%
5.	November	31	31	100%
6.	Desember	14	14	100%
Total		211	211	

Tabel 41. Penanganan Penyakit Menular

NO	Periode	Jumlah Penyakit Menular yang segera ditemukan sejak awal masuk	Jumlah Penyakit Menular Kronis di UPT	Persentase Capaian
1	Juli- Desember	9	9	100%

Tabel 42. Skrining WBP baru

NO	Periode	Jumlah warga binaan baru yang diketahui status penyakit menular kronis sejak awal masuk dan mendapatkan perawatan	Jumlah Seluruh Warga Binaan yang baru masuk	Persentase Capaian
1	Juli- Desember	9	211	9

### FORMULASI PERHITUNGAN

$$SPM = \frac{a + b + c}{3}$$

$$SPM = \frac{100 + 100 + 4.27}{3} = 68.09\%$$

$$SPM = 13.6\% \text{ (Bobot)}$$

### FORMULASI PERHITUNGAN KESELURUHAN

$$\text{Persentase} = (\sum SKD (20\%) + \sum SPS (5\%) + \sum SAF (5\%) + \sum SPD (20\%) + \sum SPK (10\%) + \sum SPL (5\%) + \sum SPP (5\%) + \sum SPR (10\%) + \sum SPM (20\%))$$

$$\text{Persentase} = (20\%) + (0\%) + (5\%) + (20\%) + (10\%) + (2.52\%) + (5\%) + (7.72\%) + (13.6\%)$$

$$\text{Persentase} = 83.84\%$$

a. Perbandingan target dan capaian

Tabel 43. Perbandingan target dengan capaian IKK 16.2

No.	Indikator	Realisasi	Target	Capaian
1.	Persentase Satker Dengan Indeks Kesehatan Fisik Dengan Kategori Baik	83.84%	10%	558.9%

Persentase Satker Dengan Indeks Kesehatan Fisik Dengan Kategori Baik menunjukkan kinerja yang jauh melampaui target yang telah ditetapkan. Pada awal periode, indikator ini ditargetkan mencapai **10%**, namun realisasi yang diperoleh justru mencapai **83.84%**. Selisih yang besar antara target dan realisasi tersebut menghasilkan tingkat capaian sebesar **558.9%**.

Persentase Satker dengan Indeks Kesehatan Fisik kategori baik menunjukkan bahwa rangkaian upaya pemenuhan standar kesehatan, pelayanan dasar, serta penguatan sistem layanan medis di lingkungan masyarakat telah berjalan secara menyeluruh dan konsisten sehingga menghasilkan kinerja yang jauh melampaui ekspektasi awal. Menggambarkan bahwa berbagai elemen pelayanan kesehatan fisik telah diterapkan tidak hanya sesuai ketentuan, tetapi juga dengan kualitas pelaksanaan yang kuat dan berorientasi pada kebutuhan nyata warga binaan. Pada aspek pemenuhan kebutuhan dasar, penyelenggaraan makanan sesuai standar gizi, penyediaan pakaian, perlengkapan tidur, serta sarana kebersihan pribadi menunjukkan bahwa fondasi kesehatan fisik warga binaan telah terbangun dengan baik, sehingga risiko gangguan kesehatan akibat pemenuhan kebutuhan dasar yang tidak memadai dapat ditekan secara signifikan.

Di sisi lain, penyelenggaraan aktivitas fisik yang terstruktur mendukung upaya menjaga kebugaran serta mencegah penyakit tidak menular, sementara sistem pemeliharaan kesehatan dasar yang meliputi skrining awal, pemeriksaan berkala, penanganan penyakit, legalitas klinik, hingga kerja sama dengan Puskesmas dan rumah sakit setempat, menunjukkan bahwa layanan kesehatan telah dikelola secara profesional dan berbasis kebutuhan. Pelayanan bagi kelompok berkebutuhan khusus, termasuk lansia dan penyandang disabilitas, turut memperlihatkan keseriusan UPT dalam memastikan bahwa kelompok rentan memperoleh perlindungan kesehatan yang memadai melalui penyediaan sarana prasarana, penyuluhan, dan layanan khusus yang relevan.

Capaian yang besar ini juga mencerminkan peningkatan signifikan pada aspek perawatan kesehatan lanjutan, seperti keikutsertaan dalam BPJS/JKN serta penyediaan mekanisme rujukan medis yang tertata dengan baik. Di samping itu, penyelenggaraan layanan paliatif dan rehabilitasi kesehatan turut menunjukkan bahwa sistem kesehatan fisik di UPT Masyarakat tidak hanya mengutamakan penanganan penyakit, tetapi juga

memperhatikan kualitas hidup serta proses pemulihan warga binaan secara menyeluruh. Pengendalian penyakit menular yang dijalankan secara teratur dan berbasis deteksi dini semakin menegaskan bahwa UPT mampu menekan risiko penyebaran penyakit di lingkungan hunian terbatas. Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan bahwa budaya kerja yang berorientasi pada kesehatan, penguatan pengawasan internal, dan kolaborasi lintas sektor telah berkontribusi besar pada peningkatan indeks kesehatan fisik, sekaligus menjadi pijakan yang kuat dalam mempertahankan mutu layanan pada periode selanjutnya.

b. Perbandingan Capaian 2025 dengan Tahun 2024

Persentase Satker dengan Indeks Kesehatan Fisik kategori baik tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2024, karena indikator ini belum tersedia dan belum digunakan sebagai ukuran kinerja pada tahun 2024. Indikator tersebut baru mulai diterapkan pada tahun 2025, sehingga tidak terdapat baseline atau data pembanding dari tahun sebelumnya. Oleh karena itu, capaian 558.9% pada tahun 2025 menjadi nilai awal (baseline) untuk digunakan sebagai acuan evaluasi dan peningkatan pada tahun-tahun berikutnya.

c. Perbandingan capaian Tahun 2025 dengan Target jangka menengah dalam dokumen Renstra

Tabel 44. Perbandingan Capaian IKK 16.2 dengan Renstra

Indikator	Capaian (2025) & Target Jangka Menengah				
	2025	2026	2027	2028	2029
Indeks Pencegahan	558.9%	22%	30%	37%	45%

Berdasarkan dokumen **Rencana Strategis Lapas Kelas IIA Watampone Tahun 2025-2029**, target kinerja untuk indikator Indeks Pencegahan ditetapkan sebesar **15%**. Realisasi pada periode pelaksanaan menunjukkan angka **83.84%**, sehingga menghasilkan capaian sebesar **558.9%**. Deviasi positif yang sangat signifikan ini karena metode pencegahan yang mencerminkan bahwa rangkaian upaya preventif yang meliputi kepatuhan pegawai terhadap SOP, efektivitas pelaksanaan penggeledahan, serta pemeriksaan narkoba bagi warga binaan telah berjalan secara konsisten dan memberikan hasil yang lebih baik dari proyeksi awal. Capaian yang jauh melampaui target ini sekaligus menjadi landasan (baseline) yang kuat dalam merumuskan arah peningkatan program pembinaan pada periode selanjutnya sebagaimana telah digariskan dalam Renstra Tahun 2025-2029.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator kinerja kegiatan ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase Satker dengan Indeks Kesehatan Fisik kategori baik hanya dilakukan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

e. Analisis Faktor Keberhasilan

Faktor keberhasilan pencapaian Indeks Kesehatan Fisik kategori baik tidak lepas dari serangkaian inovasi, ketepatan prosedur, serta konsistensi pelaksanaan layanan kesehatan yang berbasis kebutuhan warga binaan.

- a) Pelaksanaan inovasi ADAMA yang memastikan kontrol kesehatan harian langsung ke blok hunian sehingga potensi penyakit dapat terdeteksi lebih cepat dan lebih akurat.
- b) Keberadaan petugas yang telah mengikuti pelatihan keamanan pangan sehingga kualitas dan higienitas pengolahan makanan bagi warga binaan tetap terjaga.
- c) Penerapan skrining kesehatan bagi setiap tahanan baru sebelum diterima atau ditolak sebagai langkah pencegahan masuknya penyakit menular serta menjaga standar kesehatan lingkungan pemsarakatan.
- d) Pemberian susu bagi warga binaan lansia untuk menjaga stabilitas kesehatan kelompok rentan dan memenuhi kebutuhan gizi tambahan.
- e) Pelaksanaan skrining kesehatan seluruh warga binaan dengan fokus pada kasus TB melalui Active Case Finding menggunakan pemeriksaan chest X-ray yang didukung oleh PHTC Kementerian Kesehatan RI Tahun 2025 serta bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Bone, Puskesmas Bajoe, dan PT. Cito Putra Utama.
- f) Penyelenggaraan senam rutin setiap hari Kamis dan Jumat untuk menjaga kebugaran warga binaan dan mencegah risiko penyakit tidak menular.
- g) Kegiatan bersih-bersih lingkungan yang dilakukan setiap hari di area dalam blok maupun area luar sehingga sanitasi lingkungan selalu terjaga dan risiko penyakit berbasis lingkungan dapat diminimalkan.
- h) Konsistensi layanan medis, penguatan sanitasi, serta koordinasi lintas sektor yang secara keseluruhan membentuk sistem kesehatan fisik yang lebih responsif, terstruktur, dan adaptif.

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian Indeks Kesehatan Fisik kategori baik tercermin dari kemampuan UPT Pemasarakatan memaksimalkan seluruh potensi yang

dimiliki tanpa menambah beban anggaran secara berlebihan. Pemanfaatan warga binaan sebagai tenaga pendukung menjadi salah satu strategi kunci, di mana mereka dilibatkan dalam kegiatan kebersihan lingkungan, pendistribusian perlengkapan dasar, serta membantu memastikan keteraturan di blok hunian sehingga petugas dapat lebih fokus pada pelaksanaan tugas teknis dan pelayanan kesehatan. Inovasi ADAMA, yang mengandalkan petugas kesehatan untuk melakukan kontrol langsung ke dalam blok hunian setiap hari, juga memperlihatkan penggunaan waktu dan tenaga secara efektif karena deteksi dini dapat dilakukan tanpa menunggu laporan atau keluhan, sehingga mengurangi kebutuhan tindakan medis lanjutan yang lebih besar. Selain itu, keberadaan petugas yang telah mengikuti pelatihan keamanan pangan menjadikan pengawasan higienitas dapur lebih efisien, karena satu petugas terlatih mampu memastikan standar terpenuhi tanpa perlu menambah personel khusus. Proses skrining tahanan baru oleh perawat sebelum diterima membantu mencegah masuknya kasus penyakit serius yang dapat membebani layanan kesehatan, sedangkan pemberian susu kepada warga binaan lanjut usia dilakukan dengan mekanisme distribusi teratur yang meminimalkan pemborosan. Semua ini menunjukkan bahwa kombinasi antara pemberdayaan warga binaan, optimalisasi kompetensi petugas, dan integrasi alur pelayanan telah menjadi fondasi utama dalam menciptakan kinerja yang efisien, terukur, dan berdaya guna tinggi.

g. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program-program yang dijalankan Lapas Kelas IIA Watampone memiliki peran langsung dalam mendorong tingginya pencapaian Persentase Satker dengan Indeks Kesehatan Fisik kategori Baik, terutama karena berbagai aktivitas tersebut memperkuat seluruh elemen pelayanan kesehatan, pemenuhan kebutuhan dasar, pengawasan klinis, serta kualitas sanitasi lingkungan. Inovasi **ADAMA (Aku Datang Melayani Anda)** menjadi salah satu program paling menentukan, sebab pendekatan layanan aktif ini memungkinkan deteksi dini gangguan kesehatan dan memastikan tindak lanjut cepat sebelum kondisi berkembang menjadi masalah serius. Pelatihan **keamanan pangan** bagi petugas dapur dan penerapan standar higienis dalam pengolahan makanan juga memberikan kontribusi besar, karena kualitas makanan yang aman, terukur, dan bergizi merupakan indikator penting dalam penilaian kesehatan fisik. Selain itu, program **skrining kesehatan tahanan baru**, kerja sama rujukan dengan Puskesmas dan RSUD, serta pemberian dukungan kesehatan bagi kelompok khusus seperti lansia melalui **program susu harian**, semuanya membentuk rangkaian upaya yang memperkuat kondisi fisik warga binaan dan memperlihatkan kesiapan satker dalam menerapkan standar kesehatan yang ditetapkan.

Namun, pencapaian tinggi tidak terlepas dari risiko kegagalan apabila beberapa program tidak berjalan secara optimal. Misalnya, apabila kegiatan ADAMA terhenti karena keterbatasan tenaga kesehatan, monitoring kesehatan harian dapat melemah sehingga keluhan warga binaan berpotensi terlambat ditangani dan berdampak pada skor indeks. Begitu pula bila pelatihan keamanan pangan tidak dilakukan secara berkelanjutan atau terjadi pergantian petugas dapur tanpa pembekalan yang memadai, kualitas pengolahan makanan dapat menurun dan memengaruhi aspek higienitas maupun gizi. Gangguan pada pemenuhan kebutuhan dasar seperti keterlambatan distribusi perlengkapan kebersihan, kerusakan sarana mandi, atau ketidakteraturan penyediaan air bersih juga dapat menjadi faktor penghambat, karena penilaian indeks kesehatan fisik sangat sensitif terhadap kondisi sanitasi dan kebersihan lingkungan. Jika elemen-elemen tersebut tidak dijaga konsisten, maka capaian yang semula sangat tinggi dapat mengalami penurunan. Oleh sebab itu, keberlangsungan pengawasan, pemeliharaan sarana, penguatan SDM kesehatan, serta stabilitas logistik menjadi pilar utama untuk memastikan bahwa program-program kesehatan benar-benar dapat menjaga pencapaian satker dalam kategori baik secara berkelanjutan.

PEMASYARAKATAN

### 3. IKK 16.3. Persentase Meningkatnya Penanganan Kasus Kesehatan Mental

Persentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental yang dihitung berdasarkan perbandingan jumlah penanganan kasus kesehatan mental dengan total jumlah kasus kesehatan mental, merupakan indikator kemajuan upaya sistem pemasyarakatan dalam menangani masalah kesehatan mental pada narapidana, tahanan, dan anak binaan. Pada perhitungan tahun berikutnya, digunakan persentase tahun berjalan dikurangi persentase tahun sebelumnya. Adapun ukuran penilaian maturitas (mengarahkan kondisi optimal) penyelenggaraan Kesehatan psikis, melalui:

- a). Preventive (deteksi dini Surveilans)
- b). Promotive (KIE, Penyuluhan dan pendampingan kesehatan psikis)
- c). Kuratif (Konseling dan psikofarmaka)
- d). Rehabilitatif (program-program pembinaan)

Tabel 45. Penanganan Kasus Kesehatan Mental

NO	Periode	Jumlah Penangan Kasus Kesehatan Mental Pada Tahun Sebelumnya	Jumlah Penangan Kasus Kesehatan Mental Pada tahun Berjalan	Persentase Capaian
1	Juli - Desember	NIHIL	NIHIL	NIHIL

#### a. Perbandingan target dan capaian

Tabel 46. Perbandingan target dengan capaian IKK 16.3

No.	Indikator	Realisasi	Target	Capaian
1.	Persentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental	NIHIL	8%	NIHIL

Persentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental tidak dapat menunjukkan kinerjanya karena realisasi yang NIHIL. Pada awal periode, indikator ini ditargetkan mencapai **8%**, namun realisasinya NIHIL karena tidak terdapat kasus kesehatan mental yang harus ditangani.

## b. Perbandingan Capaian 2025 dengan Tahun 2024

Tabel 47. Perbandingan Capaian IKK 16.3 dengan Tahun 2024

Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian 2024	Capaian 2025	Keterangan
Persentase Keberhasilan Pembinaan Kepribadian Warga Binaan yang Mendapatkan Predikat Sangat Baik	111.1%	NIHIL	Realisasi pada Tahun 2024 adalah 100% dan 2025 adalah NIHIL%, dikarenakan tidak ada kasus kesehatan mental yang terjadi.

## c. Perbandingan capaian Tahun 2025 dengan Target jangka menengah dalam dokumen Resnra

Tabel 48. Perbandingan Capaian IKK 16.3 dengan Renstra

Indikator	Capaian (2025) & Target Jangka Menengah				
	2025	2026	2027	2028	2029
Indeks Pencegahan	NIHIL	10%	12%	14%	16%

## d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator kinerja kegiatan ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental hanya dilakukan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

## e. Analisis Faktor Keberhasilan

Capaian indikator Persentase Meningkatnya Penanganan Kasus Kesehatan Mental pada tahun 2025 berada pada kategori nihil karena tidak terdapat kasus kesehatan mental yang membutuhkan intervensi khusus. Secara substansi, kondisi ini dapat dikategorikan sebagai bentuk keberhasilan, karena menunjukkan bahwa tidak ada warga binaan yang mengalami gangguan mental yang memerlukan penanganan intensif.

Keberhasilan capaian ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- 1) Lingkungan pembinaan yang kondusif, sehingga meminimalkan munculnya tekanan atau gangguan psikologis pada anak binaan.
- 2) Pelaksanaan kegiatan pembinaan kepribadian secara rutin, yang mendukung stabilitas emosional dan kesehatan mental anak.
- 3) Pengawasan dan interaksi petugas yang humanis, sehingga potensi stres atau konflik dapat dicegah sejak dini.

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penanganan kesehatan mental tetap tercapai meskipun realisasinya nihil karena tidak adanya kasus yang muncul sepanjang periode pelaporan, sehingga sumber daya yang tersedia dapat dialihkan untuk memperkuat layanan kesehatan lainnya tanpa menambah beban kerja maupun biaya operasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme deteksi dini, pemantauan rutin, serta lingkungan hunian yang kondusif berperan dalam mencegah munculnya kasus kesehatan mental, sekaligus memastikan bahwa tenaga kesehatan, sarana, dan waktu petugas dapat dimanfaatkan secara optimal dan tidak terbuang pada proses penanganan yang tidak diperlukan..

g. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator penanganan kesehatan mental meskipun realisasinya nihil terutama bertumpu pada pelaksanaan pemantauan kesehatan harian, kontrol rutin ke blok hunian, serta komunikasi aktif antara petugas kesehatan dan warga binaan. Kehadiran inovasi layanan seperti kunjungan langsung ke kamar hunian, skrining awal bagi tahanan baru, serta kegiatan kebersihan dan olahraga rutin turut menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan minim pemicu stres. Selain itu, koordinasi yang baik dengan tenaga medis serta kesiapsiagaan fasilitas klinik memastikan bahwa jika ada potensi kasus muncul, dapat segera ditangani tanpa menimbulkan beban berlebih. Kombinasi program preventif ini membentuk ekosistem layanan yang efektif sehingga tidak terjadi kasus kesehatan mental yang membutuhkan penanganan lanjutan.

#### 4. IKK 16.4. Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Pada Rumah Sakit di Lingkungan Masyarakat

Indikator Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Masyarakat merupakan ukuran yang menunjukkan adanya perbaikan atau peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan di rumah sakit-rumah sakit yang berada di bawah naungan sistem masyarakat dari satu periode waktu ke periode waktu berikutnya. Pada Lapas, Rutan, dan LPKA, indikator ini merujuk pada pelaksanaan peningkatan kualitas layanan kesehatan di poliklinik UPT masing-masing.

##### a). Pemenuhan Peningkatan Target Mutu Pelayanan Kesehatan (Bobot 25%)

Tabel 49. Mutu Pelayanan Kesehatan

NO	Periode	Jumlah Hari Perawatan Pasien	Jumlah Hari Tempat Tidur	Persentase Capaian
1	Juli-Desember	0	0	NIHIL

FORMULASI PERHITUNGAN

$$a = \frac{0}{0} \times 100\%$$

$$a = \text{NIHIL}$$

Tabel 50. Jumlah Pasien Keluar

NO	Periode	Jumlah Hari Perawatan Pasien Keluar (Hidup + Mati)	Jumlah Pasien Keluar (Hidup + Mati)	Persentase Capaian
1	Juli-Desember	6	10	60%

FORMULASI PERHITUNGAN

$$b = \frac{6}{10} \times 100\%$$

$$b = 60\%$$

Tabel 51. Jumlah Pasien Keluar dan Tempat Tidur

NO	Periode	Jumlah Pasien Keluar (Hidup+Mati)	Jumlah Tempat Tidur	Persentase Capaian
1	Juli-Desember	10	2	500%

## FORMULASI PERHITUNGAN

$$c = \frac{10}{2} \times 100\%$$

$$c = 500\%$$

Tabel 52. Jumlah Observasi Kebersihan Tangan

NO	Periode	Jumlah observasi kepatuhan kebersihan tangan yang benar	Jumlah total observasi kebersihan tangan	Persentase Capaian
1	Juli-Desember	3	3	100%

## FORMULASI PERHITUNGAN

$$d = \frac{3}{3} \times 100\%$$

$$d = 100\%$$

Tabel 53. Jumlah Petugas Patuh

NO	Periode	Jumlah petugas yang patuh menggunakan APD sesuai tindakan	Jumlah total petugas yang diobservasi	Persentase Capaian
1	Juli-Desember	5	5	100%

## FORMULASI PERHITUNGAN

$$e = \frac{5}{5} \times 100\%$$

$$e = 100\%$$

Tabel 54. Jumlah Pasien Survei

NO	Periode	Jumlah Kumulatif waktu tunggu seluruh pasien yang di survei	Jumlah seluruh pasien yang disurvei (sampel)	Persentase Capaian
1	Juli-Desember	30	30	100%

## FORMULASI PERHITUNGAN

$$f = \frac{30}{30} \times 100\%$$

$$f = 100\%$$

FORMULASI PERHITUNGAN

$$PCT = \frac{a + b + c + d + e + f}{6}$$

$$PCT = \frac{0 + 60 + 500 + 100 + 100 + 100}{6}$$

$$PCT = 143\%$$

$$PCT = 35\%$$

**b). Ketersediaan Sarana Prasarana RS Secara Lengkap Sesuai Standar (Bobot 25%)**

Tabel 55. Sarana dan Prasarana Klinik

NO	Periode	Jumlah Item S&P yang tersedia memenuhi syarat	Jumlah total item S&P yang diwajibkan sesuai kelas RS	Persentase Capaian
1	Juli-Desember	40	57	70.18%

FORMULASI PERHITUNGAN

$$SRS = \frac{40}{57} \times 100\%$$

$$SRS = 70,18\%$$

$$SRS = 17.55\%%$$

**c). Pemenuhan Ketersediaan SDM Kesehatan Sesuai Standar Pelayanan (Bobot 25%)**

Tabel 56. Ketersediaan SDM Kesehatan

NO	Periode	Jumlah SDM tersedia	Jumlah kebutuhan SDM ideal sesuai standar pelayanan	Persentase Capaian
1	Juli-Desember	5	12	41.67%

FORMULASI PERHITUNGAN

$$SDM = \frac{5}{12} \times 100\%$$

$$SDM = 41.67\%$$

$$SDM = 10.42\%$$

**d). Terselenggaranya Kerjasama Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya (Bobot 25%)**

Tabel 57. Kerjasama Fasilitas Pelayanan Kesehatan

NO	Periode	Jumlah Kerja Sama	Jumlah Rencana Kerja Sama	Persentase Capaian
1	Juli-Desember	5	5	100%

FORMULASI PERHITUNGAN

$$FPK = \frac{30}{30} \times 100\%$$

$$FPK = 100\%$$

$$FPK = 25\%$$

$$\% = PCT + SRS + SDM + FPK$$

$$\% = 35\% + 17.55\% + 10.42\% + 25\%$$

$$\% = 87.97\%$$

a. Perbandingan target dan capaian

Tabel 58. Perbandingan target dengan capaian IKK 16.4

No.	Indikator	Realisasi	Target	Capaian
1.	Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasarakatan.	87.97%	80%	109.96%

Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasarakatan menunjukkan kinerja yang jauh melampaui target yang telah ditetapkan. Pada awal periode, indikator ini ditargetkan mencapai **80%**, namun realisasi yang diperoleh justru mencapai **87.97%**. Selisih yang besar antara target dan realisasi tersebut menghasilkan tingkat capaian sebesar **109.96%**.

b. Perbandingan Capaian 2025 dengan Tahun 2024

Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasarakatan tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2024, karena indikator ini belum tersedia dan belum digunakan sebagai ukuran kinerja pada tahun 2024. Indikator tersebut baru mulai diterapkan pada tahun 2025, sehingga tidak terdapat baseline atau data pembandingan dari tahun sebelumnya. Oleh karena itu, capaian 109.96% pada tahun 2025 menjadi nilai awal (baseline) untuk digunakan sebagai acuan evaluasi dan peningkatan pada tahun-tahun berikutnya.

c. Perbandingan capaian Tahun 2025 dengan Target jangka menengah dalam dokumen Resnra

Tabel 59. Perbandingan Capaian IKK 16.4 dengan Resnra

Indikator	Capaian (2025) & Target Jangka Menengah				
	2025	2026	2027	2028	2029
Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasarakatan	109.96%	85%	90%	95%	100%

Berdasarkan dokumen **Rencana Strategis Lapas Kelas IIA Watampone Tahun 2025-2029**, target kinerja untuk indikator Persentase Upt Pemasarakatan dengan Indeks Kesehatan lingkungan dengan kategori baik ditetapkan sebesar **80%**. Realisasi pada periode pelaksanaan menunjukkan angka **87.97%**, sehingga menghasilkan capaian sebesar

**109.96%**. Deviasi positif yang sangat signifikan menunjukkan bahwa fondasi manajemen Layanan Kesehatan di UPT Pemasarakatan telah terbentuk cukup kuat. Capaian yang jauh melampaui target ini sekaligus menjadi landasan (baseline) yang kuat dalam merumuskan arah peningkatan program pembinaan pada periode selanjutnya sebagaimana telah digariskan dalam Renstra Tahun 2025-2029

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator kinerja kegiatan ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasarakatan hanya dilakukan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

e. Analisis Faktor Keberhasilan

Analisis faktor keberhasilan pada indikator Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di lingkungan pemasarakatan menunjukkan bahwa capaian tersebut didorong oleh penguatan sistem layanan, peningkatan koordinasi, serta respons cepat terhadap kebutuhan medis warga binaan. Meskipun layanan rawat inap di klinik pemasarakatan belum dapat dilaksanakan, mekanisme rujukan ke rumah sakit berjalan sangat efektif karena setiap warga binaan dengan kondisi yang memerlukan perawatan lanjutan segera dibawa ke fasilitas kesehatan rujukan tanpa penundaan. Konsistensi koordinasi dengan rumah sakit daerah, tersedianya petugas kesehatan yang siaga, serta kejelasan alur pelayanan turut memastikan bahwa penanganan medis berlangsung cepat, aman, dan sesuai standar. Selain itu, peningkatan kualitas pencatatan kesehatan, komunikasi antara tenaga medis pemasarakatan dan rumah sakit, serta pengawasan berlapis dalam proses rujukan memperkuat keandalan layanan yang diterima warga binaan. Kombinasi unsur-unsur tersebut menciptakan sistem layanan kesehatan yang lebih responsif dan tertata, sehingga berkontribusi signifikan terhadap keberhasilan pencapaian indikator ini.

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam peningkatan kualitas layanan kesehatan di lingkungan pemasarakatan tercermin dari pemanfaatan optimal tenaga kesehatan yang tersedia, termasuk koordinasi cepat antara klinik pemasarakatan dan rumah sakit rujukan. Meskipun layanan rawat inap belum dapat dilaksanakan di klinik, mekanisme rujukan yang segera dilakukan bagi warga binaan dengan kondisi yang membutuhkan perawatan intensif membuat pelayanan tetap efektif tanpa menimbulkan pemborosan sumber daya internal. Pengelolaan obat, penggunaan fasilitas dasar klinik, serta kerja sama dengan rumah sakit setempat dimaksimalkan untuk memastikan setiap kebutuhan medis tertangani tepat waktu,

sehingga penggunaan sumber daya tetap efisien meski layanan lanjutan dilakukan di luar UPT.

g. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja ditunjukkan melalui pelaksanaan berbagai kegiatan strategis yang secara langsung memperkuat kualitas layanan kesehatan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Inovasi ADAMA yang dilaksanakan setiap hari menjadi salah satu pilar utama, karena memastikan bahwa pemeriksaan kesehatan dilakukan secara aktif dan menyentuh seluruh warga binaan tanpa terkecuali. Selain itu, program kerja sama dengan berbagai pihak eksternal seperti Dinas Kesehatan Bone, Puskesmas Bajoe, PT. Cito Putra Utama, serta dukungan PHTC Kementerian Kesehatan RI tahun 2025 turut memperkuat implementasi layanan kesehatan, khususnya melalui skrining kesehatan menyeluruh dengan fokus pada deteksi dini TB melalui Active Case Finding menggunakan pemeriksaan chest X-ray. Kegiatan ini memastikan potensi penyakit menular dapat ditemukan lebih cepat dan ditangani sesuai standar. Kolaborasi lintas sektor yang kuat, mekanisme pendampingan kesehatan yang konsisten, serta pola pelayanan responsif melalui program ADAMA menjadi faktor yang saling melengkapi sehingga program-program tersebut secara keseluruhan memberikan kontribusi signifikan terhadap kemudahan pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan.



LAPAS KELAS IIA WATAMPONE

# Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan (SK 19)

BRIEFING  
KALAPAS

LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
KELAS IIA WATAMPONE

WATAMPONE,



## D. SK 19. Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan

### 1. IKK 19.1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan

Indikator ini menggambarkan pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi sesuai tugas dan kewenangan Sekretariat Ditjen Pemasaryakatan.

Tabel 60. Pelaksanaan RB

No.	Indikator	Realisasi	Target	Capaian
1.	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	100%	100%	100%

#### FORMULASI PERHITUNGAN

$$\% = \frac{100\%}{100\%} \times 100\%$$
$$\% = 100\%$$

#### a. Perbandingan target dan capaian

Tabel 61. Perbandingan target dengan capaian IKK 19.1

No.	Indikator	Realisasi	Target	Capaian
1.	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	100%	100%	100%

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan menunjukkan kinerja yang memenuhi target yang telah ditetapkan. Pada awal periode, indikator ini ditargetkan mencapai **100%**, realisasi yang diperoleh mencapai **100%**. Sehingga nilai antara target dan realisasi tersebut menghasilkan tingkat capaian sebesar **100%**.

#### b. Perbandingan Capaian 2025 dengan tahun 2024

Tabel 62. Perbandingan Capaian IKK 19.1 dengan Tahun 2024

Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian 2024	Capaian 2025	Keterangan
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	100%	100%	Realisasi pada Tahun 2024 adalah 100% dan 2025 adalah 100%.

- c. Perbandingan capaian Tahun 2025 dengan Target jangka menengah dalam dokumen Renstra

Tabel 63. Perbandingan Capaian IKK 19.1 dengan Renstra

Indikator	Capaian (2025) & Target Jangka Menengah				
	2025	2026	2027	2028	2029
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan dokumen **Rencana Strategis Lapas Kelas IIA Watampone Tahun 2025-2029**, target kinerja untuk indikator Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan ditetapkan sebesar **100%**. Realisasi pada periode pelaksanaan menunjukkan angka **100%**, sehingga menghasilkan capaian sebesar **100%**. Deviasi positif ini menunjukkan Lapas Kelas IIA Watampone telah memenuhi target RAT RB Triwulan III. Capaian yang mencapai target ini sekaligus menjadi landasan (baseline) yang kuat dalam merumuskan arah peningkatan program pada periode selanjutnya sebagaimana telah digariskan dalam Renstra Tahun 2025-2029

- d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator kinerja kegiatan ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan hanya dilakukan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

- e. Analisis Faktor Keberhasilan

Rencana Aksi RB pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Watampone terdiri dari 6 komponen yaitu:

1. Terimplementasikannya sistem perencanaan, penganggaran dan informasi kinerja yang terintegrasi, berbasis teknologi informasi yang mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
2. Terbangunnya Pelayanan Publik (digital service);
3. Meningkatnya kualitas pengawasan;
4. Meningkatnya kualitas pengelolaan Arsip Digital dan data statistic sectoral;
5. Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengelolaan keuangan dan asset;
6. Terwujudnya percepatan transformasi jabatan fungsional;

Dari keenam Rencana Aksi RB tersebut, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone telah melaksanakan seluruh kegiatan pada 6 komponen diatas dengan realisasi 100%.

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya pada pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi tercapai dengan optimal karena seluruh kegiatan berhasil direalisasikan tanpa memerlukan tambahan anggaran maupun penambahan personel. Pelaksanaan aksi dilakukan dengan memaksimalkan struktur dan SDM yang sudah ada, termasuk pemanfaatan tim kerja internal yang sebelumnya telah dibentuk, sehingga koordinasi dan eksekusi program dapat berjalan cepat dan tanpa pemborosan. Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses monitoring, pelaporan, dan dokumentasi juga mengurangi kebutuhan penggunaan bahan fisik serta menekan biaya operasional. Selain itu, sinergi dengan unit-unit kerja terkait di tingkat kewilayahan memungkinkan pertukaran informasi dan dukungan teknis tanpa memerlukan alokasi sumber daya baru. Secara keseluruhan, capaian 100% ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi mampu dijalankan dengan efisiensi tinggi, berbiaya rendah, namun tetap memenuhi seluruh target dan standar yang ditetapkan.

g. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan pencapaian indikator Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi tidak terlepas dari konsistensi pelaksanaan program-program pendukung seperti penguatan integritas pegawai, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pembenahan tata kelola melalui SOP yang diperbarui. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala membantu memastikan bahwa seluruh aksi reformasi berjalan sesuai rencana dan dapat segera diperbaiki jika ditemukan kendala. Selain itu, program internalisasi budaya kerja berorientasi kinerja serta peningkatan kapasitas pegawai melalui pelatihan dan pendampingan turut memperkuat komitmen organisasi dalam mencapai sasaran reformasi birokrasi. Kombinasi program tersebut menciptakan ekosistem kerja yang adaptif, akuntabel, dan terarah, sehingga target dapat dicapai secara penuh.

## 2. IKK 19.2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing

Indikator ini menggambarkan tingkat kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasarakatan terhadap layanan kesekretariatan yang diberikan pada UPT Pemasarakatan masing-masing. Indikator ini merupakan komposit dari 10 parameter, yakni :

1. Kompleksitas persyaratan layanan;
2. Kejelasan informasi layanan;
3. Kemudahan prosedur layanan;
4. Ketepatan waktu penyelesaian layanan;
5. Kesesuaian layanan yang diberikan dengan kebutuhan;
6. Respon terhadap pengaduan, masukan dan saran terkait layanan;
7. Respon dalam menghadapi masalah saat memberikan layanan;
8. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan;
9. Sikap dan profesionalitas petugas dalam memberikan layanan;
10. Keadilan dan konsistensi dalam pemberian layanan.

Tabel 64. Survey Layanan Kesekretariat

Indikator Kinerja Kegiatan	Bulan	Survey	Jumlah Responen
Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing	Juli - Des	3.73	119

Berdasarkan hasil survei kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasarakatan terhadap layanan kesekretariatan selama periode Juli-Desember, diperoleh rata-rata indeks sebesar 3,73 dengan total responden sebanyak 119 orang. Capaian ini menggambarkan bahwa pelaksanaan pelayanan administrasi dan dukungan tata usaha di lingkungan UPT Pemasarakatan telah berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel.

Secara umum, tren hasil survei pada enam bulan pertama menunjukkan konsistensi nilai indeks 3.66, menandakan stabilitas mutu layanan yang baik. Meskipun terdapat fluktuasi

kecil pada beberapa bulan, kepuasan pengguna layanan tetap berada pada kategori “Sangat Puas”. Hal ini mencerminkan komitmen kesekretariatan dalam memberikan pelayanan prima serta terus menjaga kualitas dan profesionalisme dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan UPT Pemasarakatan.

a. Perbandingan target dan capaian

Tabel 65. Perbandingan target dengan capaian IKK 19.2

No.	Indikator	Realisasi	Target	Capaian
1.	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing	3.73	3.51	106%

Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing menunjukkan kinerja yang memenuhi target yang telah ditetapkan. Pada awal periode, indikator ini ditargetkan mencapai Indeks **3.51**, realisasi yang diperoleh mencapai **Indeks 3.73**. Sehingga nilai antara target dan realisasi tersebut menghasilkan tingkat capaian sebesar **106%**.

b. Perbandingan Capaian 2025 dengan tahun 2024

Tabel 66. Perbandingan Capaian IKK 19.2 dengan Tahun 2024

Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian 2024	Capaian 2025	Keterangan
Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing	122%	106%	Realisasi pada Tahun 2024 adalah 3.8 dan 2025 adalah 3.73. Menurunnya capaian terjadi karena meningkatnya target di Tahun 2025 dari 3.1 menjadi 3.51

c. Perbandingan capaian Tahun 2025 dengan Target jangka menengah dalam dokumen Renstra

Tabel 67. Perbandingan Capaian IKK 19.2 dengan Renstra

Indikator	Capaian (2025) & Target Jangka Menengah				
	2025	2026	2027	2028	2029
Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing	3.73	3.52	3.53	3.54	3.55

Berdasarkan dokumen **Rencana Strategis Lapas Kelas IIA Watampone Tahun 2025-2029**, target kinerja untuk indikator Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing ditetapkan sebesar **3.51**. Realisasi pada periode pelaksanaan menunjukkan angka **3.73**, sehingga

menghasilkan capaian sebesar **106%**. Deviasi positif ini menunjukkan Keberhasilan pelaksanaan layanan kesekretariatan di Lapas Kelas IIA Watampone ditunjang oleh respons cepat pimpinan dalam menindaklanjuti setiap saran dan keluhan pegawai terkait integritas, sehingga permasalahan dapat segera diidentifikasi dan diselesaikan. Capaian yang mencapai target ini sekaligus menjadi landasan (baseline) yang kuat dalam merumuskan arah peningkatan program pada periode selanjutnya sebagaimana telah digariskan dalam Renstra Tahun 2025-2029

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator kinerja kegiatan ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing hanya dilakukan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

e. Analisis Faktor Keberhasilan

Dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan layanan kesekretariatan pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Watampone yaitu:

1. Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Watampone segera menindaklanjuti atas segala saran dan keluhan pegawai terkait dengan Integritas di Lapas Kelas IIA Watampone;
2. Pelaksanaan Rapat Internal pegawai Lapas Secara Berkala untuk mengevaluasi hasil survey integritas.

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan layanan kesekretariatan tercermin dari pemanfaatan optimal waktu, tenaga, dan mekanisme koordinasi internal yang sederhana namun efektif. Tindak lanjut cepat oleh Kepala Lapas terhadap saran dan keluhan pegawai membuat proses penyelesaian masalah berjalan tanpa memerlukan alokasi sumber daya tambahan. Selain itu, pelaksanaan rapat internal secara berkala dilakukan dengan memanfaatkan struktur organisasi yang sudah ada, sehingga evaluasi survei integritas dapat dilaksanakan tanpa menambah beban anggaran maupun kebutuhan personel. Pendekatan ini memastikan bahwa pengawasan, monitoring, dan perbaikan layanan kesekretariatan tetap berjalan efisien dan tepat sasaran.

g. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan pencapaian indikator layanan kesekretariatan ditunjang oleh program tindak lanjut cepat oleh Kepala Lapas terhadap setiap masukan pegawai, yang membantu menjaga iklim kerja positif serta memperkuat budaya integritas. Selain itu, pelaksanaan rapat internal secara rutin menjadi sarana evaluasi yang efektif untuk memonitor perkembangan, mengidentifikasi persoalan sejak dini, serta memastikan hasil survei integritas ditindaklanjuti secara terukur. Kedua program ini saling melengkapi sehingga pelaksanaan layanan kesekretariatan dapat berjalan stabil, adaptif, dan sesuai tujuan kinerja.

## B. Realisasi Anggaran

Berdasarkan SP DIPA-137.04.2.692421/2025 tanggal 2 Desember 2024, DIPA Lemabaga Pemasarakatan Kelas IIA Watampone telah mengalami revisi anggaran, revisi pemenuhan belanja pegawai satker maupun revisi pemenuhan tugas dan fungsi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Watampone.

Tabel 68. Realisasi Anggaran

Jenis Belanja	Pagu	Realisasi
Belanja Pegawai	Rp. 7.845.422.000	Rp. 7.708.764.143
Belanja Barang	Rp. 8.689.955.000	Rp. 7.602.003.041
Belanja Modal	0	0

Adapun pagu Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Watampone sebesar Rp 15.820.933.000,- (Lima Belas Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah) dengan perincian bahwa untuk belanja pegawai dengan pagu Rp 7.130.978.000,- (Tujuh Milyar Seratus Tiga Puluh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp 4.205.491.666,- (Empat Milyar Dua Ratus Lima Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupiah) atau sebesar 58,97%.

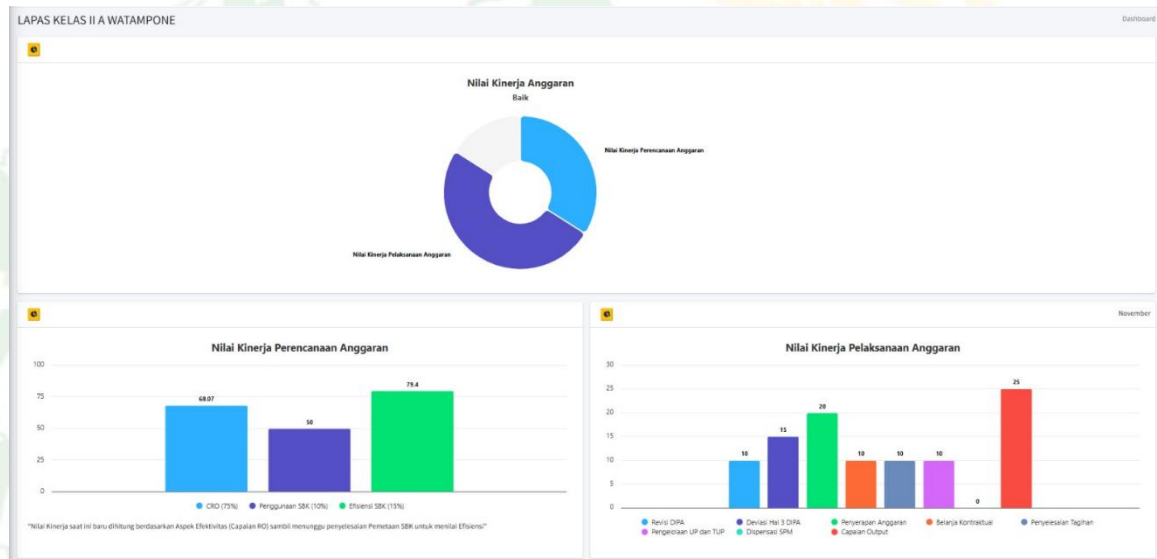
Adapun pagu untuk belanja barang sebesar Rp 8.689.955.000,- (Delapan Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah), terealisasi sebesar Rp 3.312.762.593,- (Tiga Milyar Tiga Ratus Dua Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah) atau sebesar 38,12%.

Adapun pagu untuk belanja modal sebesar Rp 0,- (Nol Rupiah), terealisasi sebesar Rp 0,- (Nol Rupiah) atau sebesar 0%.

### C. Capaian Kinerja Anggaran

Capaian kinerja anggaran dihasilkan dari 2 variabel, yakni nilai kinerja pada aplikasi SMART DJA dan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Adapun nilai SMART DJA adalah sebagai berikut.

Gambar 2. Kinerja Anggaran



Gambar tersebut menunjukkan bahwa Nilai SMART Lapas Kelas IIA Watampone tahun 2025 adalah Sangat Baik. Selain itu, dapat diketahui diketahui bahwa nilai CRO 75 %, Penggunaan SBK 10%, dan Efisiensi SBK 15% Adapun perinciannya dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3. Pagu dan Realisasi Belanja



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
LAPAS KELAS II A WATAMPONE

#### PAGU DAN REALISASI BELANJA

Bulan : 01 s.d. 12

No	BA-Satker	Nama Satker	KPPN	Ket	Jenis Belanja										Total	
					Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	Bansos	Lain-lain	Transfer			
1	137-692421	LAPAS KELAS II A WATAMPONE	055	PAGU	7,845,442,000	8,689,955,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,535,397,000
				REALISASI	7,708,764,143	7,602,003,041	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0	15,310,767,184
				PERSENTASE	(98.26%)	(87.48%)										(92.59%)
				SISA	136,677,857	1,087,951,959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,224,629,816
			TOTAL	PAGU	7,845,442,000	8,689,955,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,535,397,000
				REALISASI	7,708,764,143	7,602,003,041	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	0	15,310,767,184
				PERSENTASE	(98.26%)	(87.48%)										(92.59%)
				SISA	136,677,857	1,087,951,959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,224,629,816

**Disclaimer: Realisasi berbasis kas dan bersifat netto (memperhitungkan pengembalian belanja sebagai pengurang realisasi) sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Laporan Ketersediaan Dana (FA)**

Nilai IKPA Lapas Kelas IIA Watampone pada tahun 2025 adalah **100%**, Namun nilai IKPA akan terus bergerak masih ada waktu perpanjangan waktu untuk pengisian output. Sehingga capaian kinerja pelaksanaan anggaran dapat dipersentasekan dalam tabel berikut :

Tabel 69. Nilai IKPA dan SMART

Capaian	Nilai	Bobot%	Persentase	Nilai Capaian Kinerja Anggaran
SMART	95.66%	60%	57.3%	97.3%
IKPA	100%	40%	40%	

#### D. Capaian Kinerja Lainnya

##### 1. Capaian 13 Program Akselerasi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan

###### a. Lapas Kelas IIA Watampone Memberantas Peredaran Narkoba dan Pelaku Penipuan

Lapas Kelas IIA Watampone secara konsisten melaksanakan pengeledahan rutin dan tes urine setiap bulan di blok hunian Anak Binaan. Kegiatan ini dilakukan oleh petugas pengamanan sebagai langkah preventif dan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan, termasuk peredaran narkoba, penggunaan handphone ilegal, serta barang terlarang lainnya. Selain itu, Tim Intelegen rutin mendengarkan percakapan warga binaan melalui Layanan Telepon untuk menghimbau terjadinya penipuan atau percakapan yang dapat mengancam keamanan. Melalui kegiatan razia ini, Lapas Watampone berkomitmen mewujudkan lingkungan pemsarakatan yang bersih, tertib, dan kondusif sesuai arahan Menteri Imigrasi dan Pemsarakatan. Peningkatan intensitas pengeledahan terbukti efektif menjaga keamanan lembaga dan mencegah terjadinya pelanggaran tata tertib.

###### b. Lapas Kelas IIA Watampone Melaksanakan Rehabilitasi Pemsarakatan.

Lapas Kelas IIA juga melaksanakan program rehabilitasi pemsarakatan, kegiatan yang dimulai pada bulan Juli ini mengharuskan para peserta rehabilitasi melaksanakan kegiatan-kegiatan positif guna membangun kepercayaan diri kembali. Selain itu, pelaksanaan konseling dan penguatan kesadaran diri rutin dilaksanakan melalui morning meeting dan konseling oleh pihak BNN. Dengan pola pembinaan yang berkesinambungan ini, peserta dibantu memulihkan diri, memperbaiki pola pikir, serta membangun motivasi agar tidak kembali pada perilaku menyimpang setelah bebas nanti.

### c. Lapas Kelas IIA Watampone Memberdayakan Warga Binaan untuk Mendukung Ketahanan Pangan

Lapas Kelas IIA Watampone aktif mengembangkan berbagai kegiatan produktif seperti peternakan ayam, penanaman sayur, dan pembuatan tempe. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan mendukung ketahanan pangan Lembaga, tetapi juga menjadi sarana pelatihan bagi warga binaan dalam hal budidaya dan manajemen hasil panen. Dukungan dari BLK Kab. Bone dalam pemberian pelatihan turut memperkuat pelaksanaan program ini. Dengan kegiatan yang terencana dan partisipatif, warga binaan dilatih untuk memiliki rasa tanggung jawab, disiplin, dan mandiri dalam mengelola sumber daya yang ada.

### d. Lapas Kelas IIA Watampone Melaksanakan Penguatan dan Peningkatan Pendayagunaan Warga Binaan dalam Menghasilkan Produk Meubel

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Watampone berkomitmen kuat dalam meningkatkan pemberdayaan warga binaan melalui program pelatihan dan pembinaan kemandirian yang berorientasi pada nilai ekonomi. Fokus utama dari inisiatif ini adalah pelatihan pembuatan furnitur, meliputi kursi, meja, lemari, dan tempat tidur, yang sepenuhnya dikerjakan oleh warga binaan.

Tujuan dari program ini adalah:

- Membekali warga binaan dengan kemampuan wirausaha.
- Menghasilkan produk berkualitas yang berpotensi menjadi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
- Menumbuhkan kemandirian, produktivitas, dan mendukung reintegrasi sosial mereka di masyarakat.

### e. Bantuan Sosial Kepada Keluarga Warga Binaan Yang Kurang Mampu dan Masyarakat di Sekitar Area UPT Pemasyarakatan

Lapas Kelas IIA Watampone menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat sekitar dan keluarga warga binaan. Berbagai kegiatan sosial seperti Donor Darah, Penyaluran paket Sembako, dan Pemberian Susu kepada WBP lansia. Seluruh kegiatan tersebut adalah wujud nyata semangat kemanusiaan, kebersamaan, dan solidaritas sosial. Selain mempererat hubungan antara Lembaga dan masyarakat, kegiatan ini juga menanamkan nilai empati serta kepedulian sosial bagi seluruh pegawai dan warga binaan sebagai bagian dari pembinaan karakter yang berkelanjutan.

#### f. Mengatasi Permasalahan Overcapacity dan Over Crowding dengan Solusi yang Komprehensif

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Watampone secara konsisten mengoptimalkan pelaksanaan berbagai program pengeluaran narapidana dan pemberian hak untuk mendukung kebijakan nasional terkait percepatan penanganan masalah over kapasitas (overcapacity) hunian. Lapas Watampone menggunakan berbagai program yang dilaksanakan secara transparan, objektif, dan akuntabel untuk mengurangi kepadatan hunian, sekaligus mendorong warga binaan agar terus berperilaku baik. Proses pemberian hak ini didasarkan pada ketentuan yang berlaku, hasil penilaian perilaku, dan capaian pembinaan warga binaan. Program pengeluaran ini berfungsi sebagai langkah untuk mengurangi populasi hunian dan memfasilitasi reintegrasi sosial bagi narapidana yang memenuhi syarat. Langkah-langkah percepatan ini merupakan bagian dari komitmen Lapas Watampone dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan yang manusiawi, efektif, dan berorientasi pada reintegrasi sosial yang adil bagi setiap warga binaan.

#### g. Optimalisasi Pelayanan dan Keterbukaan Informasi Publik Lapas Watampone

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Watampone berkomitmen penuh dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan keterbukaan informasi sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Lapas Watampone telah mengoptimalkan layanan kunjungan bagi keluarga dan pihak berkepentingan, baik melalui pendaftaran tatap muka maupun sistem daring. Optimalisasi layanan ini merupakan wujud nyata upaya Lapas Watampone dalam menyediakan pelayanan yang mudah diakses, transparan, serta informatif bagi masyarakat dan warga binaan.

#### 2. E-Monev Bappenas

Aplikasi e-Monev Bappenas adalah aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan intervensi pemerintah pusat (Renja-Kementerian/Lembaga). Aplikasi ini juga digunakan untuk pemantauan pelaksanaan RKP (melalui output-output prioritas yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga). Lapas Kelas IIA Watampone telah melakukan pelaporan pada aplikasi e-Monev Bappenas setiap bulannya dengan progres 100%.



Gambar 4. E-Monev Bappenas

### 3. Kegiatan Prioritas Nasional

Adapun laporan kegiatan prioritas nasional berisi capaian yang dihasilkan dari pelaksanaan program prioritas nasional yang dilakukan oleh Unit Eselon I atau satuan kerja di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia . Lapas Kelas IIA Watampone yang berada dibawah naungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Selatan tidak memiliki kegiatan dengan skala prioritas nasional.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kegiatan dan anggarannya, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) pada tahun 2025 Semester II. LKJIP ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja dari Indikator Kinerja Utama (IKU) terpilih Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone, Tahun 2025 secara komprehensif sebagai wujud pertanggung jawaban publik (public accountability).

LKJIP ini disusun berdasarkan dokumen Perencanaan Kinerja dan dokumen Penetapan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone tahun 2025 Semester II yang mengacu sepenuhnya pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tahun 2025-2029. Indikator yang diukur adalah capaian indikator kinerja utama (IKU) yaitu dengan membandingkan realisasi IKU dengan target IKU.

Secara umum, pencapaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone pada Tahun 2025 Semester II sudah cukup maksimal. Hal ini tidak lepas dari peran serta seluruh elemen organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone yang terlibat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, program strategis serta partisipasi publik melalui berbagai kemitraan dengan pihak ketiga.

### **B. Saran**

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di atas maka guna meningkatkan kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone khususnya dalam pencapaian sasaran perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Memperkuat koordinasi antara Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone, Kantor Wilayah (Divisi Pemasyarakatan), Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, serta pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan.
2. Meningkatkan kapasitas SDM Pemasyarakatan melalui kegiatan bimbingan teknis, pelatihan, maupun diklat teknis pemasyarakatan.
3. Mengusulkan peningkatan alokasi anggaran pemasyarakatan dalam rangka memenuhi kebutuhan standar kegiatan-kegiatan teknis pemasyarakatan.
4. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas pemasyarakatan.
5. Meningkatkan dan memperkuat sistem pengawasan baik terhadap warga binaan pemasyarakatan maupun terhadap petugas pemasyarakatan.

Demikian laporan yang disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan penyusunan rencana kerja dan peningkatan kinerja pada tahun yang akan datang.



## DATA DUKUNG



*Kegiatan Peternakan Ayam*



*Kegiatan Perkebunan dan Pertanian*





**Kegiatan Kemandirian**



**Kegiatan Cukur Rambut**

PEMASYARAKATAN



***Kegiatan Pengelasan***



***Pengarahan Oleh plt. Kalapas***



**Kegiatan Keagamaan**



**Penyaluran Dirosa dan Kegiatan Maulid Nabi**



**Kegiatan Keagamaan Nasrani**



**Operasi Pengeledahan**



**Kontrol Blok Hunian Rutin**



**Pelaksanaan Tes Urine**



**Pelaksanaan Morning Meeting Rehabilitas**



**Kegiatan Pendidikan dan Konseling**



**Aktivitas Kebugaran Fisik**



**Penyaluran Susu Untuk Lansia**



**Skrining Menyeluruh WBP**



***Pekan Olahraga WBP***



***Penyaluran Makanan ke WBP***



***Pemberian Remisi***



**Rapat Internal**



**Pelatihan Fisik dan Mental Pegawai**



**Kegiatan Bersih Bersih Saluran Depan Lapas**



**Bakti Sosial dan Donor Darah**



**Pelayanan Terhadap Masyarakat**



Sertifikat